

## Perempuan Pekerja Migran

### Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan Pekerja Migran

### Artikel

Dimensi Kerentanan Perempuan Pekerja Migran di Tengah Disrupsi Perkembangan Industri dan Pandemi

*Yovi Arista, Zulyani Evi, Wahyu Susilo*

Perlindungan Perempuan Pekerja Migran: Pembaharuan Hukum yang Tertunda

*Sulistiyowati Irianto*

Analisis Gender Program Ekonomi Produktif untuk Perempuan Purna Pekerja Migran:

Studi Kasus di Desa Kenanga, Kabupaten Indramayu

*Andi Misbahul Pratiwi, Yusmiati Vistamika Wangka, Andi Nur Faizah*

Kerentanan Pekerja Migran Terhadap Ekstremisme Kekerasan: Studi Kasus Perempuan

Purna Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong

*Aris Arif Mundayat, Wahyu Susilo, Zulyani Evi*

Perdagangan Perempuan dan Anak di Nusa Tenggara Timur sebagai Kekalahan Komunitas Subsisten terhadap Ekonomi Pasar Tenaga Kerja Migran

*Domingus Elcid Li*

Persaudarian Purna Migran: Studi Kasus Program 'Desbumi' dan 'Desmigratif' di Kabupaten Wonosobo

*Zulyani Evi, Yovi Arista, Safina Maulida, Arief Rahadian*

Diterbitkan oleh:

YAYASAN  
**YJP**  
JURNAL  
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan  
No. Akreditasi: 36/E/KPT/2019

# Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia  
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke [ima@jurnalperempuan.com](mailto:ima@jurnalperempuan.com))

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: [www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org)

Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295, email: [ima@jurnalperempuan.com](mailto:ima@jurnalperempuan.com)).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami [www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org) dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

**Gadis Arivia**

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

**PENDIRI**

Dr. Gadis Arivia  
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno  
Ratna Syafrida Dhanny  
Asikin Arif (Alm.)

**DEWAN PEMBINA**

Dr. Gadis Arivia  
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno  
Mari Elka Pangestu, Ph.D.  
Svida Alisjahbana

**DIREKTUR & PEMIMPIN REDAKSI**

Dr. Atnike Nova Sigiro

**DEWAN REDAKSI**

Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)  
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)  
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universiteit van Amsterdam)  
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam & Gender, UIN Syarif Hidayatullah)  
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)  
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)  
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)  
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)  
Dr. Andi Achdian (Sejarah & Sosiologi, Universitas Nasional)

**MITRA BESTARI**

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)  
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Former Regional Representative Ford Foundation Jakarta)  
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)  
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)  
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)  
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)  
Dr. (iur) Asmin Fransiska, SH, LLM (Hukum & Hak Asasi Manusia, Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta)  
Dr. Irene Hadiprayitno (Hak Asasi Manusia & Hubungan Internasional, Leiden University)  
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)  
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)  
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)  
Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha Womens University)  
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)  
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)

Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)  
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)  
Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)  
Dr. Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Indonesian Scholarship and Research Support Foundation)  
Dr. Widjajanti M Santoso (Gender, Sosiologi & Media, Indonesian Institute of Sciences)  
Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo (Hukum & Gender, Universitas Indonesia)  
Dr. Bagus Takwin (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)  
Ikhaputri Widiyanti, M. Si. (Filsafat dan Feminisme, Universitas Indonesia)  
Elisabet Kuswijayanti (Ekologi dan Gender)  
Francisca Saveria Sika Ery Seda, Ph.D. (Sosiologi, Gender & Kemiskinan, Universitas Indonesia)  
Ruth Indiah Rahayu, M. Fil. (Sejarah, Gender & Filsafat, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)  
Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen and Feminisme, Appalachian State University, USA)  
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)  
Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender, University of Notre Dame)  
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)  
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)  
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

**REDAKSI PELAKSANA**

Andi Misbahul Pratiwi

**SEKRETARIS REDAKSI**

Abby Gina Boangmanalu

**REDAKSI**

Dewi Komalasari

**SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN**

Himah Sholihah  
Andri Wibowo

**DESAIN & TATA LETAK**

Dina Yulianti

**ALAMAT REDAKSI:**

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang  
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540  
Telp./Fax (021) 2270 1689  
E-mail: [yjp@jurnalperempuan.com](mailto:yjp@jurnalperempuan.com)  
[redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com)

**WEBSITE:**

[www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org)  
[indonesianfeministjournal.org](http://indonesianfeministjournal.org)

Cetakan Pertama, Agustus 2020

**MAMPU**

Kemitraan Australia - Indonesia  
untuk Kesetaraan Gender  
dan Pemberdayaan Perempuan



**MIGRANT CARE**  
Perempuan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat

## Daftar Isi

### Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan Pekerja Migran/Women Migrant Workers .....	iii-iv
Atnike Nova Sigiro	

### Artikel

- Dimensi Kerentanan Perempuan Pekerja Migran di Tengah Disrupsi Perkembangan Industri dan Pandemi/*Dimensions of Women Migrant Workers' Vulnerabilities Amidst Industrial Development and Pandemic's Disruption* ..... 135-148  
Yovi Arista, Zulyani Evi, Wahyu Susilo
- Perlindungan Perempuan Pekerja Migran: Pembaharuan Hukum yang Tertunda/*Protection for Women Migrant Workers: The Delaying Legal Reform* ..... 149-161  
Sulistiyowati Irianto
- Analisis Gender Program Ekonomi Produktif untuk Perempuan Purna Pekerja Migran: Studi Kasus di Desa Kenanga, Kabupaten Indramayu/*Gender Analysis on Productive Economy Program for Returnee Women Migrant Workers: Case Study in Kenanga Village, Indramayu Regency* ..... 163-176  
Andi Misbahul Pratiwi, Yusmiati Vistamika Wangka, Andi Nur Faizah
- Kerentanan Pekerja Migran Terhadap Ekstremisme Kekerasan: Studi Kasus Perempuan Purna Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong/*Migrant Workers' Vulnerabilities to Exposure of Violent Extremism: Case Study of Indonesian Returnee Women Migrant Workers in Hong Kong* ..... 177-189  
Aris Arif Mundayat, Wahyu Susilo, Zulyani Evi
- Perdagangan Perempuan dan Anak di Nusa Tenggara Timur sebagai Kekalahan Komunitas Subsisten terhadap Ekonomi Pasar Tenaga Kerja Migran/*Trafficking of Women and Children in East Nusa Tenggara Province as the Defeat of Subsistent Community to Market Economy of Migrant Labour* ..... 191-207  
Dominggus Elcid Li
- Persaudaraan Purna Migran: Studi Kasus Program 'Desbumi' dan 'Desmigratif' di Kabupaten Wonosobo/*Ex-Migrant Workers' Sisterhood: Case Study on 'Desbumi' and 'Desmigratif' Programs in Wonosobo District* ..... 209-219  
Zulyani Evi, Yovi Arista, Safina Maulida, Arief Rahadian

JP 106 Perempuan Pekerja Migran diterbitkan oleh Yayasan Jurnal Perempuan bersama Migrant CARE dengan dukungan dari Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU). Program MAMPU merupakan inisiatif bersama Pemerintah Australia dan Indonesia bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan miskin di Indonesia ke layanan penting dan program pemerintah lainnya dalam rangka mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Pandangan dalam artikel ini merupakan perspektif masing-masing penulis dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

## Perempuan Pekerja Migran *Women Migrant Workers*

Berdasarkan data *World Migration Report 2020*, Indonesia merupakan satu dari 10 besar negara di Asia penerima remitansi dari pekerja migrannya. Remitansi yang diperoleh dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada tahun 2017 mencapai US \$ 8,78 miliar, dan pada tahun 2018 meningkat menjadi US \$ 10,97 miliar – atau setara dengan 6,91 persen pendapatan APBN 2019. Meningkatnya remitansi ini berbanding lurus dengan pertumbuhan jumlah PMI sejak tahun 2013 hingga tahun 2019, di mana proporsi pertumbuhan pekerja migran perempuan Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja migran laki-laki. Pada tahun 2019, BP2MI mencatat jumlah penempatan PMI sebanyak 276.553 orang, dan dari jumlah tersebut 191.237 orang adalah perempuan. Maka dapat diperkirakan bahwa pekerja migran perempuan merupakan penyumbang remitansi terbesar.

Salah satu konsep yang muncul dalam studi feminisme terkait migrasi dan pekerja migran adalah konsep ‘feminisasi migrasi’ (*feminization of migration*). Feminisasi migrasi dapat dilihat sebagai gejala meningkatnya jumlah migrasi perempuan, khususnya arus migrasi di beberapa kawasan, misalnya arus perempuan pekerja migran dari negara-negara berkembang di Asia seperti dari Indonesia, Bangladesh, Filipina ke negara-negara seperti Korea, Taiwan, dan negara-negara di Timur Tengah. Feminisasi migrasi juga dapat dilihat dari meningkatnya permintaan akan jenis pekerjaan ‘feminin’ – atau jenis pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan perempuan, seperti pekerja rumah tangga, pengasuh, termasuk juga pekerja seks.

Konsep feminisasi migrasi penting untuk mengungkapkan pola migrasi yang tergenderisasi. Konsep feminisasi migrasi mengungkapkan peran perempuan pekerja migran sebagai aktor penting dalam arus migrasi tenaga kerja, dan sebagai penyumbang penting bagi pengentasan kemiskinan melalui remitansi yang dikirim kepada keluarga di kampung halamannya. Konsep yang sama juga dapat mengungkapkan bahwa arus migrasi perempuan telah melanggengkan subordinasi terhadap kerja-kerja domestik, seperti kerja pengasuhan (*care work*) sebagai jenis pekerjaan khas perempuan, pekerjaan rendah, karena dianggap tidak membutuhkan keterampilan. Akibatnya, perempuan pekerja migran pun rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan yang terjadi di ranah domestik di negara-

negara penerima, dan juga subordinat dalam kebijakan-kebijakan negara.

Eksplorasi dan kekerasan oleh majikan, maupun penipuan oleh agen pemberi kerja, masih merupakan persoalan-persoalan klasik yang dihadapi oleh perempuan pekerja migran. Di negara tujuan pekerja migran yang tidak memiliki aturan yang baik dalam hal ketenagakerjaan, hak-hak perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, serta tidak memiliki penegakan hukum terhadap agen tenaga kerja yang melakukan eksploitasi, maka perempuan pekerja migran akan rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi. Kasus-kasus seperti paspor ditahan oleh majikan, visa kerja bermasalah, pekerjaan yang tidak sesuai perjanjian, merupakan beberapa persoalan yang kerap menyebabkan pekerja migran dianggap sebagai pekerja ilegal (*illegal migrant worker*). Status semacam ini membuat pekerja migran kerap kehilangan haknya sebagai subjek hukum.

Kejahatan lintas negara (*trans-national crime*) dan kejahatan internasional terorganisir (*international organized-crime*) juga mengancam perempuan pekerja migran. Beberapa kasus perdagangan manusia, dan kurir narkoba sesungguhnya memperlihatkan kerentanan perempuan pekerja migran terhadap kejahatan lintas negara. Tak hanya itu, fenomena mengejutkan muncul dalam temuan Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) akan adanya paparan ideologi ekstremisme kekerasan atas nama agama terhadap komunitas perempuan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Fenomena keterlibatan perempuan pekerja migran dalam berbagai kejahatan internasional ini akan semakin menyudutkan posisi perempuan pekerja migran yang telah tersubordinasi, menjadi rentan terhadap stigma negatif. Oleh sebab itu, upaya mitigasi ancaman kejahatan internasional terhadap perempuan pekerja migran perlu didorong dalam kerangka pencegahan dan perlindungan, bukan semata-mata dalam kerangka pembedaan dan stigma terhadap perempuan pekerja migran.

Pelindungan pekerja migran merupakan tanggung jawab negara, baik negara pengirim maupun negara penerima. Maka diskursus pekerja migran juga menjadi isu penting dalam hubungan dan kerjasama internasional. Salah satu konsep yang berkembang di tingkat global adalah konsep migrasi aman (*safe migration*). Migrasi aman adalah prosedur migrasi yang aman bagi pekerja

migran untuk mereduksi kerentanan, serta memperkuat akses perlindungan dan hak pekerja migran. Konsep ini telah disepakati oleh komunitas internasional dan dituangkan dalam Konvensi PBB No. 1990 tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*). Sebagai salah satu negara pihak dari Konvensi 1990 ini, Indonesia berkewajiban untuk menerjemahkan upaya perlindungan pekerja migran melalui pembentukan aturan perundang-undangan, kebijakan, serta tata kelola migrasi tenaga kerja yang aman dan bermartabat, baik di tingkat nasional, daerah, maupun dalam perjanjian bilateral maupun multilateral terkait migrasi tenaga kerja.

Kemajuan dalam upaya perlindungan PMI tampak dengan disahkannya Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). UU PPMI tahun 2017 dinilai telah membawa kerangka normatif yang positif terhadap perlindungan pekerja migran, khususnya jika dibandingkan dengan UU terdahulu yang sangat berorientasi bisnis. Namun UU PPMI tahun 2017 dinilai masih belum memasukkan dimensi gender yang dibutuhkan agar perlindungan PMI juga responsif terhadap persoalan perempuan pekerja migran.

Untuk mengatasi persoalan kemiskinan, banyak perempuan pekerja migran harus terus hidup dalam siklus migrasi hingga fisik atau kondisi sosial (misalnya

menikah, memiliki anak, orang tua sakit) mengharuskan mereka berhenti menjadi pekerja migran. Ketika menjadi seorang purna pekerja migran, mereka tetap akan menghadapi persoalan kemiskinan struktural di pedesaan. Perhatian terhadap situasi perempuan purna migran semestinya juga mendapatkan perhatian lebih, baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Program 'Desa Peduli Buruh Migran' (Desbumi) yang dikembangkan oleh Migrant CARE dan 'Desa Migran Produktif' (Desmigratif) yang dikembangkan pemerintah, merupakan inisiatif program yang penting bagi perempuan purna pekerja migran, dengan mengintegrasikan upaya pemberdayaan perempuan purna migran dengan masyarakat desa atau kampung halaman mereka. Salah satu akar dari arus pekerja migran adalah kemiskinan di pedesaan, maka masa depan perempuan purna pekerja migran tidak dapat dilepaskan dari upaya untuk mengentaskan kemiskinan di pedesaan.

Jurnal Perempuan edisi Perempuan Pekerja Migran mengangkat beberapa kajian terkait diskursus dan situasi perempuan pekerja migran di Indonesia. Tanpa lensa gender maka akan sulit untuk merumuskan perlindungan perempuan pekerja migran melalui kebijakan maupun program-program perlindungan dan layanan yang dibutuhkan oleh perempuan pekerja migran. Pemahaman kritis mengenai feminisasi migrasi juga penting untuk membangun kesadaran publik tentang keberadaan dan kerentanan yang dihadapi oleh para pahlawan devisa ini. Selamat membaca!  
**(Atnike Nova Sigiro)**

Yovi Arista, Zulyani Evi, Wahyu Susilo  
(Migrant CARE, Jakarta Selatan)

**Dimensi Kerentanan Perempuan Pekerja Migran di Tengah Disrupsi Perkembangan Industri dan Pandemi**

*Dimensions of Women Migrant Workers' Vulnerabilities Amidst Industrial Development and Pandemic's Disruption*

Kode Naskah: DDC 305  
Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 3, Agustus 2020, hal. 135-148, 3 gambar, 3 tabel, 32 daftar pustaka

Women migrant workers have a significant role and contribution in driving migration, economy, and global development. Behind the remittance flows, women migrant workers are still overshadowed by the threats of various problems. The dimensions of the problems faced are increasingly complex as the depletion of mobility limits between countries, the increasing of securitization policy as well as the rapid progress of global development in social, economic, and political aspects. Through the literature review, this article intends to highlight the vulnerability of Indonesian women migrant workers from the perspective of migration and governance from a feminist perspective. The results of the review show that women migrant workers are still facing multidimensional vulnerability. This includes the actual conditions of women migrant workers facing injustice, violations of rights, affected by disruption of information-technology, and being center in the pandemic crisis. This condition also leads to the structural aspects related to protection's policy and institutional issues that are not sensitive to the interests and the root of problems faced by women migrant workers.

Keywords: women, migration, migrant workers, women migrant worker.

Perempuan pekerja migran memiliki peranan dan kontribusi yang signifikan dalam menggerakkan perekonomian dan pembangunan global. Di balik aliran remitansi yang dikontribusikan, perempuan pekerja migran masih terus dibayangi ancaman atas beragam permasalahan. Dimensi permasalahan yang dihadapi semakin kompleks seiring menipisnya batasan mobilitas antar negara namun juga menguatnya sekuritisasi perbatasan, serta perkembangan pesat geliat sosial, ekonomi dan politik global. Melalui tinjauan kepustakaan, artikel ini bermaksud untuk menyoroti kerentanan perempuan pekerja migran dari Indonesia dalam kacamata kebijakan dan tata kelola migrasi dengan perspektif feminis. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa perempuan pekerja migran masih menghadapi kerentanan multi-dimensi. Di dalamnya termasuk kondisi-kondisi aktual perempuan pekerja migran menghadapi ketidakadilan, pelanggaran hak, terdampak disrupsi teknologi informasi, hingga berada dalam pusaran kecamuk krisis pandemi. Kondisi ini juga bermuara pada aspek struktural terkait persoalan kebijakan dan kelembagaan perlindungan yang tidak sensitif pada kepentingan dan akar permasalahan yang dihadapi perempuan pekerja migran.

Kata kunci: perempuan, migrasi, pekerja migran, perempuan pekerja migran.

Sulistiyowati Irianto  
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok)

**Perlindungan Perempuan Pekerja Migran: Pembaharuan Hukum yang Tertunda**

*Protection for Women Migrant Workers: The Delaying Legal Reform*

Kode Naskah: DDC 305  
Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 3, Agustus 2020, hal. 149-161, 14 daftar pustaka

Seen as a breakthrough in protecting migrant workers, of whom are predominantly female, Law No. 18/2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers (The Migrant Workers Act of 2017), replacing Law No. 39/2004, is not void of imperfections. Prima facie, the act may be seen as progressive development in protecting Indonesian migrant workers, having embraced the many experiences and realities their profession entails. However, upon investigating the Act under the careful lens of Feminist Jurisprudence as well as other national legal instruments for gender equality, the Migrant Workers Act of 2017 still provides unsatisfactory details in regards to the protection of female workers; if the government does not quickly act by making corresponding regulations, the Act will in fact, introduce us to new problems from what was seen as a one-size fits all solution. In its implementation, legal literacy becomes one of the most profound challenges the 2017 Act faces. Field research findings in three areas (Sukabumi, Lampung, and Jakarta) show that legal literacy on this Act remains sparse. This article will address problems in regards to the 2017 Act, its implementation, and solutions to develop more tangible legal instruments in protecting Indonesian migrant workers, in particular, women, who, in foreign lands, often face the risk of violence and abuse on a daily basis with little to no protection.

Keywords: Feminist jurisprudence, migrants workers, gender justice, law literacy.

Suatu terobosan dalam bidang perlindungan pekerja migran, sebagian besarnya perempuan, dapat ditemukan dalam UU No.18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. UU ini lahir 13 tahun kemudian menggantikan UU No. 39/2004, yang menurut banyak kajian dan dalam praktiknya menyebabkan banyak persoalan. UU baru ini tampak bersifat progresif, telah banyak mengakomodir pengalaman dan realitas pekerja migran. Namun ketika diperiksa dengan pendekatan Yurisprudensi Feminis, dan menyandingkannya dengan berbagai pasal dari berbagai instrumen hukum lain yang berperspektif keadilan gender, maka tampak adanya ruang-ruang kosong yang tidak spesifik menyebut perlindungan bagi perempuan. Ruang kosong itu bila tidak segera diisi dengan peraturan pelaksanaan di bawahnya, akan kurang maksimal dalam memberi perlindungan bagi pekerja migran perempuan. Temuan penelitian lapangan di tiga wilayah (Sukabumi, Lampung dan Jakarta) menunjukkan bahwa literasi hukum yang meliputi pengetahuan tentang UU baru ini belum terbangun. Di sinilah letaknya tantangan baru bagi implementasi UU ini ke depan.

Kata kunci: Yurisprudensi Feminis, pekerja migran, keadilan gender, literasi hukum

<sup>1</sup>Andi Misbahul Pratiwi, <sup>2</sup>Yusmiati Vistamika Wangka,  
<sup>2</sup>Andi Nur Faizah  
(<sup>1</sup>Jurnal Perempuan & <sup>2</sup>Program Studi Kajian Gender  
Universitas Indonesia, Jakarta)

**Analisis Gender Program Ekonomi Produktif untuk Perempuan Purna Pekerja Migran: Studi Kasus di Desa Kenanga, Kabupaten Indramayu**

*Gender Analysis on Productive Economy Program for Returnee Women Migrant Workers: A Case Study in Kenanga Village, Indramayu District*

Kode Naskah: DDC 305  
Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 3, Agustus 2020, hal. 163-176, 1 tabel, 23 daftar pustaka

Indonesia is one of the countries of origin for migrant workers in the world. In the context of migration, the discourse on natural resources, sustainable economy, and women's empowerment are not the mainstream discussion. The resilience or economic sustainability of returnee women migrant workers (RWMWs) is also a major problem in migration policy schemes and practices in Indonesia. This paper explores how the model of economic empowerment in Kenanga Village, Indramayu District, as a local initiative can bring welfare toward RWMWs and goes beyond the discourse of safe migration. The data in this research analyzed using Harvard and Longwee' gender analysis tools as well as indicator of gender mainstreaming, and Naila Kabeer's theory of empowerment. This paper finds that local initiatives of productive economy have a positive impact on the economic sustainability of RWMWs in Kenanga Village. It is important to develop economic resilience as an alternative to alleviate poverty. However, in the empowerment program, it is important to consider various aspects of gender justice.

Keywords: returnee women migrant workers (RWMWs), women's economic empowerment, Kabupaten Indramayu, gender analysis.

Indonesia merupakan salah satu negara asal pekerja migran di dunia. Dalam konteks migrasi, diskursus mengenai sumber daya alam, ekonomi berkelanjutan, dan pemberdayaan perempuan tidak menjadi perbincangan arus utama. Ketahanan atau keberlanjutan ekonomi purna pekerja migran juga masih menjadi masalah utama dalam skema kebijakan dan praktik migrasi di Indonesia. Tulisan ini menggali bagaimana model pemberdayaan ekonomi di Desa Kenanga, Kabupaten Indramayu, sebagai sebuah insiatif lokal dapat menghadirkan kesejahteraan bagi perempuan purna pekerja migran dan melampaui diskursus migrasi aman. Data dalam penelitian ini dianalisa dengan alat analisa gender yakni Harvard, Longwee, dan indikator pengarusutamaan gender, dan teori pemberdayaan dari Naila Kabeer. Tulisan ini menemukan bahwa inisiatif lokal ekonomi produktif membawa dampak positif terhadap keberlanjutan ekonomi purna pekerja migran di Desa Kenanga. Ketahanan ekonomi di daerah asal menjadi penting untuk dibangun sebagai salah satu jalan keluar untuk mengentaskan kemiskinan. Namun demikian, dalam setiap program pemberdayaan penting untuk memperhatikan aspek keadilan gender.

Kata Kunci: perempuan purna pekerja migran, pemberdayaan ekonomi perempuan, Kabupaten Indramayu, analisa gender.

---

Aris Arif Mundayat, Wahyu Susilo, Zulyani Evi  
(Migrant CARE, Jakarta Selatan)

### **Kerentanan Pekerja Migran Terhadap Ekstremisme Kekerasan: Studi Kasus Perempuan Purna Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong**

*Migrant Workers' Vulnerabilities to Exposure of Violent Extremism: Case Study of Indonesian Returnee Women Migrant Workers in Hong Kong*

Kode Naskah: DDC 305  
Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 3, Agustus 2020, hal. 177-189, 1 tabel, 23 daftar pustaka

This qualitative study analyzes the involvement of female perpetrators of extreme violence acts and suicide bombings against the modern state as a symbol of their religious enemies. The topic is crucial as it shows the meaningful reasons for female militancy, where women are seen to exceed their gender norms. It is not because they take their own lives but also to bring their children to embrace death in the process of religious-based violent extremism. This article opposes the idea of gender in binary opposition as female and male, but rather see it as a range of gender spectrum. The understanding of the main symbolic structures here is crucial as it is capable of dismantling aspects that temporarily limit gender roles. At the same time, what they are doing is constructing new ideas that "God do not see you in someone appearance" included their gender, but rather their "action". It is their way to find justification to support extreme violence, although it is against religious teaching.

Keywords: gender, violent extremism, faith, ideology.

Studi kualitatif ini menganalisis keterlibatan perempuan pelaku aksi kekerasan ekstrem dan bom bunuh diri terhadap negara modern sebagai simbol dari musuh agama mereka. Topik ini krusial karena menunjukkan makna dibalik militansi perempuan, dimana perempuan terlihat melampaui norma gender mereka. Bukan karena mereka mengakhiri nyawa mereka sendiri, tapi karena mereka juga membawa serta anak-anak mereka untuk menyambut kematian dalam proses kekerasan ekstrem berbasis agama. Artikel ini menentang gagasan gender dalam oposisi biner sebagai perempuan dan laki-laki, tetapi lebih melihatnya sebagai rentang spektrum gender. Pemahaman tentang struktur utama simbolik di sini sangat penting karena mampu membongkar aspek-aspek yang untuk sementara waktu membatasi peran gender dalam pengertian oposisi biner. Pada saat yang sama, yang mereka lakukan adalah membangun ide-ide baru bahwa "Tuhan tidak melihat Anda dalam penampilan seseorang" termasuk gendernya, melainkan "tindakannya". Ini adalah cara mereka menemukan pembenaran untuk mendukung kekerasan ekstrem, meskipun bertentangan dengan ajaran agama.

Kata Kunci: gender, ekstremisme kekerasan, kepercayaan, ideologi.

---

Dominggus Elcid Li  
(Institute of Resource Governance and Social Change,  
Nusa Tenggara Timur)

### **Perdagangan Perempuan dan Anak di Nusa Tenggara Timur sebagai Kekalahan Komunitas Subsisten terhadap Ekonomi Pasar Tenaga Kerja Migran**

*Trafficking of Women and Children in East Nusa Tenggara Province as the Defeat of Subsistent Community to Market Economy of Migrant Labour*

Kode Naskah: DDC 305  
Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 3, Agustus 2020, hal. 191-207, 2 grafik, 4 gambar, 6 tabel, 20 daftar pustaka

The analytical view explores in this paper represent the perspective of subsistent farmers in NTT Province when integrated with market economy. It tries to explain why the subsistent community are so vulnerable to become migrant workers and uprooted from their land; it is also attempt to investigate the relation between economic policy on free labour market with death and torture received by migrant workers. While the victims, especially women and children, are publicized and attracted attention from mass media and also social media. However, the publication over the suffering of migrant workers from the margin of Indonesia such as NTT Province, does not get direct impact over the policy makers with the willingness to renew regulation to protect migrant workers. This paper focuses on investigating why the poor migrant women and children are being neglected by policy makers under the neoliberal order. It also tries to explain why the subsistent members are easily uprooted from their land and become migrant workers during modernization. It also tries to answer why the are often in position as the losers or victims during globalization. The hope that the State is able to protect the vulnerables is fading away under the domination of pro market policy. Children and women as the silent victims are the evidence of absolute surrender of the subsistent community. State incapacity to protect the most vulnerable citizens is the evidence of the coming of new wave of neocolonialism. This is also a proof the modernization is also part of conquering when half-hearted modernization has placed them at the bottom of the pyramid of modernity which is vulnerable to be exploited without the ability to speak and to be listened.

Keywords: human trafficking, trafficking of women, trafficking of girl, migrant labour, east nusa tenggara.

Kajian perdagangan orang dalam tulisan ini dibahas dalam perspektif kekalahan para petani subsisten di Nusa Tenggara Timur ketika terintegrasi dalam ekonomi pasar. Tulisan berusaha menjelaskan mengapa kaum subsisten dengan mudah beralih menjadi buruh

migran dan tercerabut dari tanahnya seiring gelombang modernisasi, dan juga berupaya menggali hubungan antara pasar bebas tenaga kerja dengan kematian dan siksaan yang mereka terima. Meskipun penderitaan anak dan perempuan buruh migran miskin dari NTT mendapat publikasi luas, penderitaan mereka cenderung diabaikan oleh para pembuat kebijakan di era neoliberal. Harapan bahwa negara akan mampu melindungi warga negara yang lemah semakin menjauh karena dominasi pikiran pro pasar tanpa regulasi dan proteksi pada tenaga kerja. Anak-anak perempuan yang menjadi korban perdagangan orang merupakan bukti kekalahan mutlak komunitas-komunitas subsisten. Ketiadaan perlindungan terhadap warga negara yang paling rentan merupakan kekalahan negara terhadap gelombang pasang neokolonialisme. Ini juga menjadi bukti bahwa modernisasi yang dijalankan dengan setengah hati menjadi bagian dari penaklukan terhadap komunitas subsisten dan meletakkan mereka di dasar piramida modernitas yang rentan dieksploitasi tanpa mampu bersuara dan didengarkan.

Kata Kunci: perdagangan manusia, perdagangan perempuan, perdagangan anak perempuan, buruh migran, nusa tenggara timur.

---

Zulyani Evi, Yovi Arista, Safina Maulida, Arief Rahadian  
(Migrant CARE, Jakarta Selatan)

### **Persaudarian Purna Migran: Studi Kasus Program 'Desbumi' dan 'Desmigratif' di Kabupaten Wonosobo**

*Ex-Migrant Workers' Sisterhood: Case Study on 'Desbumi' and  
'Desmigratif' Programs in Wonosobo District*

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 3, Agustus 2020, hal. 209-219, 10 daftar pustaka

Ex-migrant workers are often found dealing with the lack of union that could cater their needs. These people that are mostly female are often excluded from the process of decision making in their own villages. In 2013, a program from civil society organization called Desbumi (*Desa Peduli Buruh Migran* or *Migrant Workers Care Village*) Initiative was launched in Wonosobo District, with the aim to improve migrant workers' living conditions - especially female - through empowering female ex-migrant workers group. In 2016, a similar program called Desmigratif (*Desa Migran Produktif* or *Productive Migrants Village*) Initiative was spearheaded by the Ministry of Manpower, which shares

the same goal with Desbumi Initiative. Building upon the debates surrounding the concept of sisterhood provided by Bell Hooks and Robin Morgan, this study discusses whether the top-down approach in organizing female ex-migrant workers residing in Kuripan, Lipursari, Rogojati, and Sindupaten Village through Desbumi and Desmigratif initiative could result in any forms of sisterhood formed during the implementation of the programs, and challenges that they faced along the way. This study found that characteristics associated with sisterhood of friendships were apparent in all female ex-migrant groups, signified by mutual support among women, shared experience, journey of self-discovery, and collective identity built upon similarities. On the discussion of challenges, several obstacles such as lack of regeneration, women's domestic burden, and the issue of sustainability appeared along the journey of the sisterhood of ex-migrant workers.

Keywords: Ex-migrant workers, migrant workers, migrant village, rural women, sisterhood.

Purna Migran kerap mengalami kesulitan dalam mencari kelompok yang mampu memfasilitasi kebutuhan mereka. Purna migran - yang umumnya adalah perempuan - seringkali tereksklusi dari proses pengambilan keputusan di desanya masing-masing. Pada tahun 2013, program Desbumi (*Desa Peduli Buruh Migran*) diinisiasi di Kabupaten Wonosobo oleh organisasi masyarakat sipil, dengan tujuan memperbaiki kondisi pekerja migran melalui pemberdayaan komunitas perempuan purna migran. Pada tahun 2016, Kementerian Ketenagakerjaan menginisiasi program Desmigratif (*Desa Migran Produktif*) dengan tujuan program yang relatif sama dengan Desbumi. Berangkat dari pembahasan terkait konsep persaudarian yang disajikan oleh Bell Hooks dan Robin Morgan, studi ini membahas tentang bagaimana pendekatan *top-down* dalam pengorganisasian kelompok perempuan purna migran di Desa Kuripan, Lipursari, Rogojati, dan Sindupaten melalui program Desbumi dan Desmigratif mampu melahirkan bentuk-bentuk persaudarian, serta tantangan yang dihadapi oleh persaudarian sepanjang perjalanan mereka. Studi ini menemukan bahwa karakteristik yang identik dengan *sisterhood of friendships* seperti dukungan antar-perempuan, pengalaman bersama, perjalanan mencari jati diri, dan kelahiran identitas kolektif muncul di dalam kelompok-kelompok purna migran perempuan di keempat desa. Terkait tantangan yang dihadapi persaudarian, kesulitan regenerasi, beban domestik perempuan, serta isu keberlanjutan menjadi tantangan yang harus dihadapi persaudarian purna migran.

Kata Kunci: Purna migran, pekerja migran, desa migran, perempuan pedesaan, persaudarian.



## Analisis Gender Program Ekonomi Produktif untuk Perempuan Purna Pekerja Migran: Studi Kasus di Desa Kenanga, Kabupaten Indramayu

### *Gender Analysis on Productive Economy Program for Returnee Women Migrant Workers: A Case Study in Kenanga Village, Indramayu District*

<sup>1</sup>Andi Misbahul Pratiwi, <sup>2</sup>Yusmiati Vistamika Wangka, <sup>2</sup>Andi Nur Faizah

<sup>1</sup>Jurnal Perempuan & <sup>2</sup>Program Studi Kajian Gender Universitas Indonesia

<sup>1</sup>Jalan Raya Karang Pola Dalam II, No. 9A, Jatipadang-Pasar Minggu, Jakarta Selatan

<sup>2</sup>Rektorat UI Salemba, Jl. Salemba Raya No. 4, Jakarta Pusat.

andipratiwi@jurnalperempuan.com

Kronologi Naskah: diterima 13 Agustus 2020, direvisi 18 Agustus 2020, diputuskan diterima 21 Agustus 2020

#### Abstract

Indonesia is one of the countries of origin for migrant workers in the world. In the context of migration, the discourse on natural resources, sustainable economy, and women's empowerment are not the mainstream discussion. The resilience or economic sustainability of returnee women migrant workers (RWMWs) is also a major problem in migration policy schemes and practices in Indonesia. This paper explores how the model of economic empowerment in Kenanga Village, Indramayu District, as a local initiative can bring welfare toward RWMWs and goes beyond the discourse of safe migration. The data in this research analyzed using Harvard and Longwee' gender analysis tools as well as indicator of gender mainstreaming, and Naila Kabeer's theory of empowerment. This paper finds that local initiatives of productive economy have a positive impact on the economic sustainability of RWMWs in Kenanga Village. It is important to develop economic resilience as an alternative to alleviate poverty. However, in the empowerment program, it is important to consider various aspects of gender justice.

Keywords: returnee women migrant workers (RWMWs), women's economic empowerment, Kabupaten Indramayu, gender analysis.

#### Abstrak

Indonesia merupakan salah satu negara asal pekerja migran di dunia. Dalam konteks migrasi, diskursus mengenai sumber daya alam, ekonomi berkelanjutan, dan pemberdayaan perempuan tidak menjadi perbincangan arus utama. Ketahanan atau keberlanjutan ekonomi purna pekerja migran juga masih menjadi masalah utama dalam skema kebijakan dan praktik migrasi di Indonesia. Tulisan ini menggali bagaimana model pemberdayaan ekonomi di Desa Kenanga, Kabupaten Indramayu, sebagai sebuah inisiatif lokal dapat menghadirkan kesejahteraan bagi perempuan purna pekerja migran dan melampaui diskursus migrasi aman. Data dalam penelitian ini dianalisa dengan alat analisa gender yakni Harvard, Longwee, dan indikator pengarusutamaan gender, dan teori pemberdayaan dari Naila Kabeer. Tulisan ini menemukan bahwa inisiatif lokal ekonomi produktif membawa dampak positif terhadap keberlanjutan ekonomi purna pekerja migran di Desa Kenanga. Ketahanan ekonomi di daerah asal menjadi penting untuk dibangun sebagai salah satu jalan keluar untuk mengentaskan kemiskinan. Namun demikian, dalam setiap program pemberdayaan penting untuk memperhatikan aspek keadilan gender.

Kata Kunci: perempuan purna pekerja migran, pemberdayaan ekonomi perempuan, Kabupaten Indramayu, analisa gender.

#### Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara asal pekerja migran di dunia. Bank Dunia menyebutkan lebih dari sembilan juta penduduk Indonesia menjadi pekerja migran di luar negeri atau setara dengan hampir tujuh persen dari angkatan kerja Indonesia. Di kawasan Asia Timur, hanya China dan Filipina yang jumlah pekerja migrannya lebih banyak dari Indonesia (Bank Dunia 2017). Indonesia mulai secara resmi mempromosikan migrasi tenaga kerja internasional dalam skala besar pada awal tahun 1980an, menyusul menurunnya pendapatan

di sektor komoditas dan minyak (Wangka 2020). Salah satu faktor yang mendorong migrasi kerja adalah ketiadaan lapangan pekerjaan dan upah kerja yang tidak layak khususnya untuk kerja domestik di Indonesia--selain faktor global seperti tingginya permintaan pekerja domestik migran di berbagai negara. Indikasinya terlihat dari kecenderungan meningkatnya jumlah Pekerja Rumah Tangga (PRT) migran di negara-negara maju di Asia seperti Singapura, Hong Kong, dan Taiwan. Di Singapura, dalam kurun waktu lima tahun (2010-2015), jumlah PRT migran meningkat dari 201.400 menjadi 231.500, sedangkan di Taiwan pada periode yang sama,

jumlah pekerja migran di bawah kategori *caregiver* dan PRT meningkat dari 186,108 menjadi 224,356 orang (Wang et al. 2018). Sementara itu di Hong Kong jumlah PRT migran tahun 2015-2019 meningkat dari 340.380 menjadi 399.320 (Gov HK 2020).

Penempatan pekerja migran ke luar negeri kemudian bersifat reguler dan jumlahnya terus mengalami peningkatan (Wangka 2020), hingga akhir 2019 tercatat ada 276.553 pekerja migran yang ditempatkan di berbagai negara (BP2MI 2020). Dari persentase tersebut, kerja domestik atau profesi sebagai pekerja rumah tangga adalah yang paling banyak dibandingkan pekerja migran yang bekerja di sektor lain atau sebanyak 86.407 orang (BP2MI 2020). Konstruksi budaya patriarki yang membagi kerja laki-laki dan perempuan (*sexual division of labour*) dan memberikan label bahwa pekerjaan rumah tangga bukanlah pekerjaan produktif, menyebabkan profesi PRT--baik domestik maupun migran--didominasi oleh perempuan dan dianggap sebagai *unskilled labor* atau tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian (Wangka 2020; Saptari & Holzner 2017; Irawaty 2017). Hal ini berdampak pada kesejahteraan PRT dan keluarganya. Sehingga menjadi pekerja migran adalah salah satu cara untuk mendapatkan penghidupan yang layak dengan upah yang lebih tinggi.

Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Lampung menjadi 5 provinsi yang melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbanyak di tahun 2019. Sebanyak 68.740 pekerja migran Indonesia berasal dari Jawa Timur. Sedangkan 60.432 PMI berasal dari Jawa Tengah, kemudian 57.957 pekerja berasal dari Jawa Barat (BN2PTKI 2019). Bila dikategorikan berdasarkan Kabupaten atau Kota, Indramayu merupakan penyumbang pekerja migran terbesar di Indonesia dengan total pekerja migran untuk tahun 2019 yakni sebesar 23.360 jiwa (BNP2TKI 2019). Pekerja migran didominasi oleh perempuan dengan mayoritas bekerja sebagai pekerja rumah tangga (*domestic workers*) dan perawat atau pengasuh (*caregiver*). Di kabupaten Indramayu jumlah perempuan pekerja migran yang berangkat ke luar negeri pada tahun 2015 sebesar 15.064 jiwa, sedangkan laki-laki 1.671 jiwa (BPS Kabupaten Indramayu 2017).

Dengan jumlah dan sebaran pekerja migran Indonesia di berbagai provinsi dan cukup tinggi, memunculkan berbagai diskursus mengenai migrasi itu sendiri baik dalam tataran akademis maupun politis. Beberapa contoh antara lain: promosi migrasi aman, *zero* PRT migran di Indonesia, dan romantisasi pahlawan devisa.

Dalam diskursus migrasi, tidak ada konsep baku mengenai 'migrasi aman'. Organisasi Internasional untuk migrasi (*International Organization for Migration/ IOM*) misalnya berargumen, seorang migran yang tadinya berada dalam situasi aman dapat saja menjadi tidak aman ketika melewati berbagai tahapan dalam proses migrasi. Secara umum, konsep 'migrasi aman' mengutamakan kesejahteraan para migran (IOM 2015). Diskursus tentang migrasi aman ini merupakan pengembangan dari konsep 'anti-perdagangan orang', yang menjadi perhatian NGO dan lembaga internasional pada dekade 1990an. Sebagai sebuah program, migrasi aman, melampaui atau tidak terbatas pada migrasi legal, dan sekurang-kurangnya memiliki empat elemen yaitu: status hukum para migran, meningkatnya kesadaran, terbangunnya kepercayaan (antara *broker/caló* dengan agen perekrut), dan mekanisme dukungan institusi dalam proses migrasi (Molland 2015).

Di Indonesia, diskursus migrasi aman, mengemuka seiring dengan maraknya pengalaman kekerasan yang dialami PMI, secara khusus perempuan PRT migran di berbagai negara. Hal ini mendorong pemerintah pada tahun 2009 mengeluarkan moratorium pengiriman PMI selama dua tahun ke Malaysia. Selanjutnya tahun 2011, mengeluarkan moratorium pengiriman PRT migran ke Arab Saudi dan Kementerian Ketenagakerjaan, menyusun *road map* menuju *zero* PRT migran tahun 2017 (Wahyudi 2016; Bank Dunia 2017).

Wacana ini kembali menguat di tahun 2015 ketika Presiden Joko Widodo mengeluarkan moratorium yang diperluas ke 21 negara di Timur Tengah, Afrika Utara dan Afrika Timur, dan Pakistan (Bank Dunia 2017). Moratorium dan *roadmap zero* PRT migran ini menyisakan pro dan kontra. Pada satu sisi moratorium ini dinilai memperbaiki citra Indonesia, tetapi di sisi lain memicu terjadinya peningkatan migrasi non-prosedural ke negara-negara tujuan tersebut yang justru menyebabkan pekerja migran berhadapan dengan risiko yang lebih besar (Kompas 2017; Bank Dunia 2017).

Program "Zero PRT Migran" tidak pernah terwujud di tahun 2017. Sebaliknya data BP2MI memperlihatkan pada lima bulan pertama tahun 2018, jumlah PRT migran yang ditempatkan di berbagai negara masih cukup tinggi, yaitu 35.883 orang dari total 111.878 PMI yang ditempatkan (BP2MI 2018). Gagasan Roadmap ini tidak pernah berlanjut melampaui tahap rancangan. Meski disampaikan oleh beberapa pejabat pemerintah dan dipublikasikan di media lokal, tidak ada peraturan resmi yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah terkait hal ini (Bank Dunia 2017).

Di sisi lain, diskursus mengenai sumber daya alam, ekonomi berkelanjutan, dan pemberdayaan perempuan dalam konteks migrasi tidak menjadi perbincangan arus utama. Selain itu, status ketahanan atau keberlanjutan ekonomi purna pekerja migran juga masih menjadi masalah utama dalam skema kebijakan dan praktik migrasi di Indonesia.

Mengapa penting membicarakan tentang keberlanjutan ekonomi purna pekerja migran? Menurut penelitian Bank Dunia, rentang usia sebagian besar pekerja migran Indonesia adalah dalam batasan 21-40 tahun (Bank Dunia 2017). UU PPMI 2017 sendiri tidak memberi batasan minimum atau maksimum untuk menempatkan PMI, berbeda dari UU sebelumnya (39/2004) yang memberi syarat usia minimum 21 tahun untuk PRT migran, dan non-PRT migran minimum 18 tahun. Di lapangan, usia minimum 18 tahun memicu terjadinya banyak pemalsuan usia pekerja migran pada dokumen identitas yang dapat menyebabkan mereka mendapatkan masalah hukum di negara tujuan. Batas usia ini juga mengindikasikan bahwa dalam dunia kerja migrasi, faktor usia menjadi pertimbangan. Stigma yang muncul "yang muda yang lebih produktif" juga tidak bisa dihindarkan. Artinya pekerjaan sebagai buruh migran juga sangat dipengaruhi oleh usia dan hal ini berimplikasi pada persoalan keberlanjutan ekonomi pekerja migran asal Indonesia jika tidak dimitigasi sejak dini.

Tulisan ini menggali bagaimana model pemberdayaan ekonomi di Kabupaten Indramayu sebagai sebuah inisiatif lokal dapat menghadirkan kesejahteraan bagi perempuan purna pekerja migran dan melampaui diskursus migrasi aman itu sendiri. Pemberdayaan ekonomi yang merupakan inisiatif lokal ini kemudian dapat memberikan gambaran bahwa salah satu upaya untuk memutus siklus kekerasan yang dialami pekerja migran ialah dengan memutus mata rantai kekerasan itu sendiri melalui ketahanan ekonomi--selain juga menghadirkan kebijakan yang pro perlindungan pekerja migran di level nasional dan internasional. Pemberdayaan ekonomi kemudian menjadi salah satu jalan untuk ketahanan dan keberlanjutan ekonomi di kampung halaman--khususnya dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal--serta menghadirkan berbagai pilihan dan peluang baru selain menjadi pekerja migran.

## Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kenanga, Kabupaten Indramayu. Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan insiator program penguatan ekonomi produktif perempuan purna pekerja

migran yakni, kepala desa, dan 3 orang penerima manfaat program. Adapun nama para penerima manfaat yang dituliskan di dalam penelitian ini adalah samaran dengan alasan kerahasiaan.

Tulisan ini merupakan hasil penelitian lapangan penulis sebagai mahasiswa program Studi Kajian Gender Universitas Indonesia. Data penelitian dikumpulkan pada tahun 2017, sehingga tulisan ini tidak merepresentasikan berbagai kemajuan-kemajuan program yang telah dibuat pasca penelitian ini dilakukan. Sebagai sebuah bentuk evaluasi program berbasis gender, penelitian ini telah diserahkan kepada pengelola program sebagai bentuk kontribusi penulis dalam memajukan ekonomi produktif di Desa Kenanga dan memutus siklus kekerasan berbasis gender dalam konteks migrasi.

Data dari penelitian dianalisis menggunakan kerangka analisis gender dan teori feminis. Analisis Gender menyoroti perbedaan di antara perempuan, laki-laki, anak perempuan, dan anak laki-laki, terkait akses mereka terhadap sumber daya, peluang, tantangan, dan kekuasaan dalam konteks tertentu. Analisis gender digunakan untuk menghasilkan respons yang lebih baik atau cocok untuk memperbaiki ketidaksetaraan gender (Sida 2015, Moser 1993). Analisis gender dilakukan terhadap penerima manfaat kegiatan penguatan usaha ekonomi produktif perempuan purna pekerja migran yang didampingi Wina, yang terwakili oleh tiga (3) narasumber perempuan purna pekerja migran di Desa Kenanga. Alat analisa gender yang digunakan yakni Harvard, Longwee, dan indikator pengarus utamaan gender (FAO 2014, Leder 2016). Sedangkan teori feminis yang digunakan adalah teori pemberdayaan dari Naila Kabeer (Kabeer 2001).

Kerangka analisis Harvard berfokus pada profil aktivitas perempuan dan laki-laki dalam melihat akses dan kontrol terhadap sumber daya. Kerangka ini mencoba untuk melihat alokasi sumber daya terhadap perempuan dan laki-laki. Harvard sangat penting untuk melihat perbedaan utama pekerjaan dan sumber daya perempuan dan laki-laki di dalam komunitas (FAO 2014). Dengan menggunakan analisa Harvard tulisan ini memetakan kerja produksi, reproduksi, dan sosial kemasyarakatan yang dilakukan perempuan dan laki-laki dengan terus mempertanyakan: siapa melakukan apa? siapa mendapatkan apa? (Moser 1993).

Menurut analisis Longwee, terdapat lima level di dalam pemberdayaan perempuan, yaitu kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan kontrol (Leder 2016). Kerangka kerja Longwee melihat tingkat pemberdayaan perempuan mengikuti proses yang

linier di mana perempuan memiliki kesejahteraan terlebih dahulu hingga memiliki kontrol sebagai puncak pemberdayaan. Kemudian, indikator pengarusutamaan gender (IPG) memetakan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dari program inisiatif lokal yang dikembangkan di Desa Kenanga.

### **Wina dan Kegiatan Ekonomi Produktif di Desa Kenanga**

Desa Kenanga adalah salah satu desa di Kabupaten Indramayu yang menjadi *hotspot* pekerja migran (BPS Kabupaten Indramayu 2017). Kegiatan bermigrasi sudah turun menurun dilakukan oleh penduduk Desa Kenanga Indramayu karena tidak adanya pilihan pekerjaan yang dianggap menjanjikan bagi masyarakat di sana. Menjadi pekerja migran dianggap sebagai pilihan pekerjaan yang dapat berkontribusi bagi pemenuhan ekonomi keluarga. Sayangnya pilihan pekerjaan sebagai pekerja migran disertai dengan berbagai permasalahan kekerasan, penipuan, dan pemerasan. Pekerja migran yang mayoritas perempuan mengalami berbagai persoalan di negara tujuan sehingga cita-cita membawa nafkah bagi keluarga justru tidak dapat dipenuhi dan akhirnya mereka berada dalam siklus ketidakadilan terus menerus.

Dalam rangka memutus siklus kekerasan yang dialami pekerja migran, ada sebuah inisiatif lokal penguatan ekonomi perempuan pekerja migran di Desa Kenanga Kabupaten Indramayu. Kegiatan penguatan usaha ekonomi produktif ini diinisiasi oleh Wina sejak tahun 2010. Wina adalah seorang perempuan purna pekerja migran yang mengalami berbagai bentuk kekerasan. Inisiatif lokal penguatan yang dilakukan Wina bertujuan agar tidak ada lagi perempuan yang mengalami kekerasan serupa dirinya. Bagi Wina, bermigrasi bukanlah satu-satunya cara untuk memenuhi perekonomian keluarga, justru sebaliknya masyarakat harus bisa memanfaatkan potensi yang ada di desa mereka.

Makanya saya tadi mengajarkan mereka atau mengubah *mindset* mereka *gitu loh*. Bahwa sebenarnya mereka *tuh* bisa hidup di Indonesia *gitu*, bekerja di sini *gitu loh*. Tanpa harus ke luar negeri *gitu kan*...Sebenarnya berawal dari niat...keinginan saya pribadi untuk membalas karena saya diberikan kesempatan untuk hidup lagi (setelah percobaan bunuh dirinya gagal), saya melakukan sesuatu disela-sela kesibukan saya untuk mengabdikan diri memberdayakan purna pekerja migran *ya kan*. (Wina 2017, wawancara 2 Oktober)

Wina sendiri ikut tetangganya untuk menjadi pekerja migran setelah lulus SMP. Pada awalnya ia dijanjikan untuk bekerja sebagai pengasuh anak di Singapura.

Sesampainya di Singapura ia bekerja di sebuah rumah besar (2 lantai) dengan tugas sebagai pembersih rumah. Ia mendapatkan tindakan kekerasan dari majikannya, misalnya: jika melakukan kesalahan ia tidak diberikan makan, dipaksa berdiri di bawah jemuran, dll. Karena tidak kuat bekerja dengan situasi tersebut, ia akhirnya memutuskan untuk bunuh diri dengan meminum racun.

Namun demikian, upaya bunuh diri tersebut tidak berhasil. Ia justru dipulangkan oleh majikannya ke kampung halaman di Indonesia. Sebelum dipulangkan, Wina sempat dibawa ke agen tetapi di tempat tersebut ia tidak mendapatkan kesempatan untuk berbicara. Akibatnya kekerasan yang ia alami tidak terlontarkan akibat sang majikan terus menerus berbicara dan tidak memberikan kesempatan kepada Wina untuk menjelaskan kronologi bunuh dirinya tersebut. Adapun sang majikan juga mengantar Wina hingga bandara dan hal ini dilakukan karena ia ketakutan atas tindakan kekerasan yang dilakukannya kepada Wina terbongkar.

Setelah tiba di Indonesia, pada tahun 2001 Wina aktif mengajar di Balai Latihan Kerja (BLK) salah satu perusahaan swasta penempatan Pekerja Migran di Indramayu sebagai guru bahasa Inggris untuk para calon pekerja migran di sela-sela waktu menunggu pemberangkatan ke luar negeri. Tahun 2004 ia berangkat ke Hong Kong sebagai pekerja rumah tangga migran. Selama di Hong Kong ia mengajar secara informal di Islamic Union, salah satu organisasi umat muslim Indonesia yang ada di Hong Kong, serta terlibat membantu kegiatan Dompot Dhuafa Hong Kong. Setelah 4 tahun lamanya di Hong Kong, ia pulang ke Indonesia dan menikah. Meskipun sudah menikah, Wina masih berkegiatan di BLK perusahaan swasta (P3MI), karena ia memiliki kemampuan berbahasa Kanton. Setelah melahirkan, Wina menghentikan kegiatannya di luar rumah dan fokus untuk menjadi Ibu Rumah Tangga. Pada tahun 2009, ia kembali aktif berkegiatan untuk mengajar mengaji anak-anak di lingkungan rumahnya. Melihat kondisi anak-anak pekerja migran, ia meneguhkan diri untuk memberdayakan ekonomi purna pekerja migran.

Dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif, Wina memanfaatkan jejaring personal yang ia miliki, salah satunya dengan dukungan Migrant Institute Dompot Dhuafa. Kegiatan pengembangan usaha ekonomi produktif ini merupakan kegiatan usaha individu perempuan purna pekerja migran di Desa Kenanga yang diorganisir oleh Wina. Dalam hal ini, Wina mengajak purna pekerja migran, umumnya perempuan, yang telah memulai usaha individu tetapi belum berkembang dalam hal pemasaran, kualitas, dan sertifikasi produk

untuk menjadi penerima manfaat. Komunitas Keluarga Migran Indonesia (KAMI) Migrant Institute Dompot Dhuafa mendukung Wina sejak tahun 2010 hingga 2017 untuk mengembangkan inisiatif lokalnya.

Selain mendapat dukungan dari Migrant Institute, Wina juga didukung Kementerian Tenaga Kerja yang bekerjasama dengan 10 kementerian lain, memelopori program Desa Migran Produktif (Desmigratif) pada tahun 2016. Tujuan utama program ini adalah melindungi pekerja migran sejak dari desa asal, dan memberikan pelayanan serta perlindungan calon dan pekerja migran beserta keluarganya. Desmigratif memiliki empat pilar utama yaitu, (1) sebagai pusat layanan migrasi bagi calon pekerja migran; (2) kegiatan usaha produktif bagi keluarga pekerja migran; (3) *community parenting* untuk anak-anak pekerja migran di pusat belajar, dan (4) pembentukan koperasi untuk penguatan ekonomi Produktif jangka panjang (Kata Data 2017; Media Indonesia 2018). Desa Kenanga merupakan satu dari dua desa di Indonesia yang ditetapkan menjadi Desmigratif oleh pemerintah pada waktu itu. Peran Wina antara lain menyalurkan bantuan peralatan dari program Desmigratif kepada perempuan purna pekerja migran yang telah terorganisir melalui usaha ekonomi.

Menurut penuturan Wina, terdapat sekitar 300 anggota KAMI di Desa Kenanga, tetapi tidak semuanya memiliki kegiatan usaha ekonomi. Mereka bergabung dalam KAMI untuk mengikuti kegiatan lain seperti penguatan keluarga, pengajian, dan lain-lain. Sedangkan purna pekerja migran yang telah memiliki usaha ekonomi produktif adalah 20 keluarga, dengan jenis-jenis produk yaitu sirup mangga, jus mangga, es mangga, manisan mangga, selai mangga, es rujak, rempeyek, kerupuk kulit ikan, dodol ikan, keripik usus ayam, abon ayam, abon sapi, abon ikan, jambal roti goreng, dodol mangga, keripik bakso, bakso ikan, nugget ikan, kerupuk ikan, tas tali kur, bros dari kain perca.

Dalam rangka menunjang pengembangan dan pemasaran produk hasil usaha produktif perempuan purna pekerja migran, ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Wina yakni: (1) Membantu kemasan produk (*branding*); (2) Membantu pemasaran produk (*offline* dan *online*); (3) Mendistribusikan bantuan alat kerja dari pemerintah dan lembaga; (4) Membantu meningkatkan kualitas produk; (5) Membantu pengurusan izin kesehatan (BPOM); (6) Mengadakan pelatihan pembukuan atau akuntansi dasar.

*Pertama*, Wina membantu para pelaku usaha untuk memperbaiki kemasan yang sebelumnya hanya dibuat secara sederhana. Salah satu contohnya adalah Rita

yang bergerak dalam produksi dodol mangga, diperbaiki kemasannya menjadi lebih menarik dan memuat informasi yang detail tentang produk yang dijual, sehingga dapat dijual di pasar luas.

*Kedua*, pemasaran produk melalui *online* dan *offline* produk usaha produktif. Wina dalam hal ini membantu pemasaran melalui toko oleh-oleh di Indramayu maupun pameran makanan tradisional di Jakarta. Selain itu, Wina juga mempromosikan produk kepada orang-orang yang berasal dari luar Indramayu yang datang berkunjung ke desa Kenanga. Wina juga memasarkan produk melalui media sosial seperti *facebook*.

*Ketiga*, dalam hal pendistribusian alat kerja kepada para pelaku usaha, Wina berperan untuk menginformasikan kepada pemerintah terkait jenis-jenis usaha yang dijalankan oleh para purna pekerja migran. Selanjutnya, setelah data-data tersebut diperoleh, pihak pemerintah akan memberikan bantuan berupa alat kerja kepada pelaku usaha terkait. Misalnya saja pada Rita yang bergerak dalam usaha dodol, ia mendapatkan bantuan berupa timbangan dan *sealer* dari pemerintah. Kemudian Darini (pengusaha rempeyek) mendapatkan bantuan kompor gas.

*Keempat*, produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha mendapatkan pendampingan dari Wina untuk meningkatkan kualitas produknya. Misalnya, untuk menghasilkan krupuk usus yang renyah dan bercita rasa baik Wina kerap kali melakukan eksperimen resep baru. Sama halnya dengan produk sirup dan es mangga, Wina juga mencoba resep-resep terbaru untuk meningkatkan kualitas rasa produk. Biasanya Wina belajar melalui pengusaha-pengusaha yang bergerak dalam bidang produk yang sama. Setelah mendapatkan pengetahuan pengelolaan produk dengan baik, Wina akan melakukan pendampingan kepada pelaku usaha di desa Kenanga.

*Kelima*, pendampingan untuk mendapatkan keterangan izin kesehatan produk juga dilakukan Wina kepada para pelaku usaha. Pada kasus Rita misalnya, ia dibantu untuk mendapatkan sertifikat keamanan pangan serta sertifikat kelayakan produk dari Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu. *Keenam*, Wina bekerja sama dengan BNI untuk memberikan penyuluhan kepada para pelaku usaha untuk membuat pembukuan pada usahanya. Pembukuan yang diberikan kepada para pelaku usaha purna pekerja migran disesuaikan dengan jenis usahanya. Aspek-aspek yang dimasukkan di dalam laporan keuangannya adalah jumlah bahan baku, hasil, kode produksi, tanggal kadaluarsa, pemasukan, pengeluaran, dan pengiriman produk.

## Kegiatan Penguatan Usaha Ekonomi Produktif Perempuan Purna Pekerja Migran

Darini (38 tahun) adalah purna pekerja migran yang telah memiliki 3 orang anak perempuan. Darini memiliki berbagai jenis usaha produktif yaitu berjualan rempeyek, es batu, intip, usaha *catering* yang didampingi oleh Wina. Darini memang gigih untuk memperbaiki kondisi ekonominya sejak dulu, sebelum menikah. Ia pernah bekerja sebagai pekerja migran pabrik di Korea. Pada saat itu alasannya pergi ke luar negeri untuk bekerja adalah harapan tentang kehidupan yang layak.

Dalam perjalanan menjadi pekerja migran, ia hampir tidak mendapati masalah. Setelah pulang ke tanah air ia memutuskan untuk menikah. Rencana memiliki tabungan setelah pulang dari Korea, ternyata tidak terwujud, ia masih dalam situasi miskin. Setelah menikah bahkan ia harus tinggal dengan keluarga suaminya karena tidak mampu mengontrak rumah. Suaminya yang juga mantan pekerja migran bernasib sama dengan dirinya, tidak memiliki tabungan.

Sulitnya hidup dan mencari pekerjaan di Indramayu membuat Darini tergerak untuk memulai usahanya sendiri. Di Indramayu, ia memulai usaha mandiri, berbagai usaha telah ia coba, mulai dari berjualan cilok (bakso dan sosis) untuk anak-anak kecil hingga berjualan es batu telah ia coba.

Dulu *mah* saya usahanya banyak. Sebelum rempeyek, jualan kelontong pernah, mie ayam pernah, bakso ikan pernah keliling kampung abis ashar, terus ini sekarang fokusnya di rempeyek. Kalau peyek *kan* bisa di rumah aja, sambil *liatin* anak. Dulu suami pulang baru saya jualan bakso ikan. *Ya apa ajah* mbak. Buat anak. (Darini 2017, wawancara 1 Oktober)

Darini mengakui bahwa usahanya masih belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Darini merasa tidak ada lapangan pekerjaan untuk dirinya di Indramayu. Akhirnya pada tahun 2008 ia memutuskan untuk kembali menjadi pekerja migran. Ia ditempatkan di Taiwan, dengan perjanjian awal bekerja sebagai pekerja rumah tangga merawat lansia. Namun sesampainya di sana ia justru dipekerjakan di pabrik sebagai buruh pemetik jamur. Hanya 1 tahun ia bertahan di Taiwan, sebelum akhirnya memutuskan untuk kembali ke tanah air karena anaknya rindu sekali pada dirinya. Bahkan impian memiliki rumah tingkat dan berlantai pun tidak terpenuhi.

Dulu kalau di Taiwan itu *kan* mengurus orang tua, menjaga orang tua, tapi sampai sana *metik* jamur. Banyak *tuh* kasus-kasus begitu misalnya jaga orang tua, *eh* kerja di restoran. Kita *kan pengennya* yang *cepat*. Padahal saya baru *ngerti*

kalau itu tidak sesuai kontrak. ..cuma 1 tahun, bingung di sini mau kerja apa. Anak saya yang kedua, mamah pulang, dia sering sakit-sakitan. Saya bilang kalau mamah pulang *nggak* punya rumah tingkat, kata anak saya, *ya nggk apa-apa mah* yang penting pulang. (Darini 2017, wawancara 1 Oktober)

Dua kali menjadi pekerja migran adalah pengalaman berharga bagi Darini. Setelah kembali dari Taiwan, ia memantapkan hati untuk melakukan usaha dengan serius. Kini ia fokus usaha rempeyek, es batu, intip dan menerima pesanan *catering*. Sedangkan suaminya membuka usaha membuat ukiran kaligrafi dan foto. Darini mengakui bahwa penghasilan dari usahanya lebih rutin dan pasti daripada penghasilan suaminya. Setiap hari omset berjualan rempeyek Darini adalah Rp.100.000, omset dari berjualan es batu ialah Rp. 50.000, dan penghasilan dari berjualan intip sebesar Rp. 5.000. Sedangkan suaminya berpenghasilan tidak tetap, tergantung dengan pesanan kaligrafi. Darini mengakui bahwa sering kali suaminya pulang dengan tangan kosong karena tidak ada pesanan sama sekali.

Bangun pagi, *abis* itu sholat subuh, terus urus anak, baru masak, produksi rempeyek. Goreng rempeyek jam 4 setengah 5 udah selesai, kira-kira 3 jam goreng rempeyek. Tiap hari bungkus, tergantung tenaga *sih*, kadang besoknya bungkus. Malamnya *abis* maghrib bikin rempeyek, abis maghrib bungkus rempeyek. Ada waktu senggang pagi *anterin* ke warung. Kalau ada waktunya sore *dianter*. Bikin es batu *ya* pagi, kadang dibantu in suami... Saya, suami, dan anak-anak. Suami sebelum berangkat jualan cuci piring dulu, nyuci baju. Kalau pagi saya *kan anterin* es batu ke warung. (Darini 2017, wawancara 1 Oktober)

Pembagian kerja domestik di dalam keluarga Darini relatif setara, semua anggota keluarga memiliki tugas domestiknya masing-masing. Meski demikian, jika suami atau anaknya tidak sempat melakukan kerja-kerja domestik, Darini—yang sehari-hari bekerja (usaha produktif) di dalam rumah—yang mengerjakannya. Darini lebih banyak melakukan kerja produksi dan nonproduksi, namun meski demikian yang diakui sebagai pencari nafkah utama ialah suaminya. Mengapa demikian? Persoalannya adalah adanya dikotomi kerja produksi-reproduksi, domestik-bukan domestik, atau kerja upahan atau bukan upahan di dalam masyarakat. Dikotomi tersebut menurut Saptari & Holzner (2016) berguna karena untuk pertama kalinya mulai disoroti bagian dari kerja perempuan yang selama ini tidak terlihat. Kerja reproduksi perempuan terutama yang menyangkut pengasuhan anak dan kerja domestik lainnya, yang oleh masyarakat patriarki dianggap bukan sebagai bentuk kerja. Akibat tidak terlihatnya kerja-kerja

perempuan secara jelas, maka kerja upahan perempuan di luar rumah dianggap sebagai kerja sampingan dan akhirnya mengakibatkan pengecilan arti kerja—yang dilakukan perempuan (Saptari & Holzner 2016). Dalam konteks Darini yang bekerja produktif namun di dalam rumah sehingga masih dianggap sebagai sambilan, padahal pekerjaan tersebut berkontribusi banyak terhadap keluarga bahkan menyita waktu dan energi lebih banyak.

Darini juga aktif di berbagai organisasi sosial kemasyarakatan. Ia bergabung di KAMI dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Indramayu. Ia mengakui bahwa ada banyak perubahan setelah ia ikut berorganisasi, yaitu lebih berani bicara dengan orang banyak dan mendapatkan pengetahuan tentang situasi perempuan-perempuan di seluruh Indonesia, khususnya jejaring pekerja migran.

Ikut organisasi KPI di Indramayu, saya sebagai presidium wilayah buruh migran di KPI...Ya biasa kalau buruh migran, ya diskusi cerita-cerita tentang buruh migran, *gimana* keadaan Indramayu tentang buruh migran...Ya dari kegiatan itu saya jadi tahu kemana-mana, ke Jogja, ke Surabaya, ya kalau *nggak* ikut itu di rumah *aja*, ke Jakarta sering. (Darini 2017, wawancara 1 Oktober)

Aktivitas sosial kemasyarakatan ini juga berdampak pada usaha Darini. Bantuan yang disalurkan oleh Wina melalui dukungan KAMI juga membuat kemasan produk Darini semakin baik.

Ya *alhamdulillah*, kadang sering dapat pesanan, ini sering ada kegiatan. Dulu *kan* saya kemasannya masih pakai lilin, sekarang sudah ada bantuan pakai siler, kemasannya jadi lebih bagus. (Darini, wawancara 1 Oktober)

Darini memiliki harapan untuk perempuan purna pekerja migran di Indramayu. Berefleksi dari kisah hidupnya yang berat—harus bermigrasi karena tidak ada pekerjaan—ia berharap adanya lapangan pekerjaan maupun modal usaha yang disediakan untuk masyarakat agar mereka tidak bermigrasi, khususnya perempuan yang rentan terhadap eksploitasi kerja, ekonomi dan seksual di negeri orang.

Kalau saya berharap sih perempuan Indramayu bisa buat usaha kecil kaya saya, mereka pergi ke negeri orang itu karena faktor ekonomi. Uangnya pun habis buat bikin rumah, terus berangkat lagi. Kasihan juga saya lihatnya. Ada yang pulang bawa anak ada yang babak belur. (Darini, wawancara 1 Oktober)

Rita (42 tahun) merupakan perempuan purna pekerja migran. Rita merupakan lulusan sekolah dasar dan memutuskan untuk bekerja ke Arab Saudi pada usia

yang sangat muda. Ia bekerja menjadi pekerja migran Arab Saudi selama tujuh tahun. Sepulangnya dari Arab Saudi, Rita bekerja di Jakarta di pabrik garmen. Alasannya untuk bekerja di luar negeri adalah untuk menghindari pernikahan dini atau perjodohan yang dihindaki oleh orang tuanya.

Hambatannya karena orang tua suruh kawin (tertawa). Suruh kawin. Ya namanya orang kampung ya. Jadi disuruh kawin. Terus saya mutuskan daripada saya kawin mendingan saya pergi keluar. (Rita, wawancara 1 Oktober)

Di Desa Kenanga, kini ia menjalankan usaha dodol mangga, asinan mangga, dan manisan mangga. Rita mulai merintis usaha dodol mangga sejak tahun 2016, dan mendapatkan dampingan pengembangan ekonomi produktif oleh Wina. Ide untuk membuat mangga berawal ketika dirinya melihat tetangganya membuat dodol mangga. Sejak saat itu, Rita mulai mencoba untuk belajar membuat dodol mangga dan berlatih hingga mengalami kegagalan sebanyak lima kali. Setelah proses belajar tersebut, akhirnya Rita menemukan cara dan resep yang sesuai untuk membuat dodol mangga tersebut. Rita memiliki alasan khusus untuk memilih dodol mangga sebagai jenis usahanya. Ia mengatakan bahwa di daerah lain belum ada yang memproduksi dodol mangga dan hanya ada di Desa Kenanga. Bagi Rita, Indramayu dikenal dengan buah mangganya yang berkualitas, oleh sebab itu sangat disayangkan apabila buah mangga tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik.

Modal awal untuk membuat usaha dodol mangga, yaitu sebesar Rp 1.500.000. Menurut penuturan Rita, modal tersebut diperolehnya dari hasil tabungan yang ia simpan sedikit demi sedikit. Berikut penjelasan Rita pada saat ditanyakan mengenai modal.

Modal ya awalnya dikit-dikit ya. Modal itu *nggak* hutang bank. *Nggak* hutang apa. *Alhamdulillah*. Dari *dikit* demi *dikit*. Merintis-merintis...Suami ya dia gaji *kan* dikasihkan saya. Jadi ya pokoknya *nggak* tahu itu modal dari mana *nggak* tahu modal dari mana dia *nggak* tahu menahu... Ya pokoknya *kan* gaji suami pokoknya *gimana* caranya *duit* suami sama *duit* itu bisa cukup dalam satu bulan. Jadi apa *sih* ya, pokoknya cukup *nggak* cukup ya kita harus bisa. *Ngolahnya*, bisa *ngaturnya*. (Rita 2017, wawancara 1 Oktober)

Setiap bulan suami Rita—yang bekerja sebagai Kepala Tata Usaha SMA dan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)—memberikan uang belanja kepada Rita untuk dikelola. Melalui uang belanja itulah, Rita menyisihkan uang sedikit demi sedikit untuk dijadikan modal dodol mangga.

Kegiatan produktif berupa dodol mangga, manisan mangga, dan asinan mangga tersebut hingga kini masih dikerjakan oleh Rita secara individu. Dalam proses pengupasan mangga dan pengemasan dodol, dikerjakan oleh dua orang pekerja yang masih bagian dari keluarganya. Adapun untuk stok mangga, sudah ada langganan yang mengantarkannya ke rumah Ibu Rita. Selebihnya, aktivitas lainnya seperti membeli gula di gudang, memasak dodol mangga, mencetak dodol mangga, membeli plastik kemasan, membeli label, mengantarkan dodol mangga dari toko ke toko, hingga mengontrol stok dodol mangga dikerjakan oleh Rita seorang diri. Sedangkan peran suami Rita adalah mempromosikan dodolnya di tempat kerjanya.

Dalam sehari, Rita dapat memproduksi dodol mangga sebanyak 100 *tepak* (satu *tepak* berisi 10 bungkus dodol mangga). Harga satu *tepak* dodol mangga dijual seharga Rp 10.000 untuk pembeli satuan, sedangkan untuk penjual bakulan diberikan harga sebesar Rp 9.000. Dodol seharga Rp 10.000 tersebut dijual ke toko dengan kemasan plastik yang masih sederhana. Namun demikian, terdapat perbedaan harga ketika dodol mangga didampingi dan dijual oleh Wina. Harga yang dipatok adalah sebesar Rp 18.000. Perbedaan harga ini disebabkan oleh adanya perbedaan kemasan. Pangsa pasarnya juga berbeda, Wina menjualnya melalui *platform* digital dan pameran makanan.

Rita mengungkapkan bahwa pelanggannya yang berasal dari toko maupun warung tidak dapat membeli dengan harga mahal, sehingga ia menyuplai dengan kemasan yang apa adanya, sebagaimana kutipan penjelasan Ibu Rita di bawah ini.

*Kan ini macem-macam ya. Kan koperasi Bu Wina buat online. Ya untuk online dia. Kadang-kadang kalo pameran dibawa. Dodol saya. Cuman bentuknya lain-lain. Bisa dibentuk begini, bisa dibentuk begini. Tapi yang untuk di toko oleh-oleh khas Indramayu saya biasa bentuknya. Karena kalo di toko biasa itu harganya dia nggak mau mahal... Jadi saya yang praktis aja bikinnya.* (Rita, wawancara 1 Oktober)

Oleh sebab itu, produk dodol mangga memiliki dua versi yang berbeda, yakni kemasan sederhana dengan plastik dan kemasan yang sudah rapi (menggunakan kotak dan sudah diterakan label halal). Pemasukan yang Rita dapatkan dalam satu bulan dari hasil penjualan dodol mangga, yaitu kurang lebih sebesar Rp 2.000.000. Hal yang sama untuk produksi manisan dan asinan mangga, Rita mengerjakannya seorang diri. Manisan maupun asinan mangga tersebut tidak rutin dikerjakan oleh Rita, karena bergantung pada pesanan. Apabila

tidak ada yang memesan, maka Rita tidak membuat produk tersebut.

Dalam mengerjakan aktivitas produksi dan non-produksinya, Rita bangun pukul empat pagi untuk menyiapkan kebutuhan anak dan suaminya yang akan beraktivitas di luar rumah. Setelah anak dan suaminya pergi, barulah Rita memproduksi dodol mangga di rumah yakni sekitar pukul tujuh pagi hingga pukul enam sore. Adapun untuk makan siang maupun makan malam, ia sesekali memasak namun lebih sering membeli makanan di warung. Rita mengakui bahwa dirinya sangat sibuk, sehingga ia memilih untuk membeli makanan yang sudah jadi dan tidak memasak di rumah. Sebagai bentuk kegiatan sosial kemasyarakatan, Rita mengikuti beberapa kegiatan seperti di KAMI dan Dekopinda (Dewan Koperasi Indonesia). Ia mengikuti KAMI pada tahun 2017 dan mengikuti kegiatan pelatihan pembuatan sirup, pembuatan agar-agar, pemasaran produk, maupun berbagai kegiatan lainnya terkait peningkatan usaha produktif. Rita juga kerap diundang untuk hadir dalam rapat Dekopinda dan memperoleh bantuan alat produksi seperti panci. Kegiatan pengajian juga rutin ia ikuti, menurutnya dalam kegiatan sosial kemasyarakatan tersebut akan banyak orang yang memesan dodol.

Aktivitas produksi dan reproduksi yang dilakukan oleh Rita tersebut merupakan bagian dari pengiburumahtanggan. Proses pengiburumahtanggan dalam hal ini membuat perempuan berusaha untuk menjadikan rumahnya nyaman dan tenang untuk anak-anak dan suaminya (Saptari & Holzner 15). Sebagaimana yang dilakukan oleh Rita, sebisa mungkin ia mempersiapkan kebutuhan anak dan suaminya di pagi hari sebelum ia mengerjakan dodol mangga. Kegiatan reproduksi seperti membersihkan rumah dan sebagainya tersebut merupakan jenis kerja yang tidak dibayar dan cenderung tidak dinilai sama dengan kerja produktif (March, et.al. 18). Pelekatkan terhadap kerja reproduktif sebagai pekerjaan perempuan memberikan beban berlapis pada perempuan seperti Rita yang juga mengerjakan kerja produktif. Di dalam pekerjaan rumah tangga yang lebih banyak dilakukan oleh Rita memperlihatkan pembagian kerja seksual berlangsung di dalam rumah. Ranah domestik dikerjakan oleh perempuan, sementara ranah publik dikerjakan oleh laki-laki.

Suminah (29 tahun), melakukan usaha produktif krupuk kulit ikan. Pada aktivitas produksi pembuatan kerupuk kulit ikan, suami Suminah hanya berperan membeli dan mengangkut atau membawa bahan

baku dari pabrik tempat ia bekerja. Itupun bersama-sama dengan Ibunda Suminah yang juga bekerja di pabrik yang sama. Aktivitas lainnya mulai menyiapkan bumbu, memotong kulit ikan, menggoreng, menjemur, membungkus, hingga menjajakan ke warung dan pasar dilakoni oleh perempuan, ibunya dan remaja perempuan yang bekerja lepas membantu Suminah.

Beban kerja antara sesama perempuan dalam aktivitas produksi juga menjadi berbeda, ketika ada unsur kerja yang dibayar. Relasi antara Suminah dengan remaja perempuan pekerja lepas menjadi 'pemberi kerja' dengan 'pekerja', mempengaruhi beban kerja keduanya dalam proses pembuatan kerupuk kulit ikan.

Pada kerja reproduksi, hampir semua pekerjaan domestik dikerjakan oleh perempuan, khususnya Suminah. Peran suami terlihat sebatas mengantar Suminah memeriksakan kehamilannya, itu pun tidak rutin. Dari beban kerja domestik ini terlihat bahwa Suminah dibebankan dengan begitu banyak tanggung jawab karena ia berada di rumah, sedangkan ibunya bekerja di pabrik, begitu juga suami dan ayahnya yang bekerja di luar rumah. Di sini, pekerjaan Suminah sebagai pengusaha kerupuk kulit menjadi tidak terlihat atau tidak dianggap sebagai 'kerja' karena terjadi di dalam rumah tangga, sehingga pekerjaan rumah tangga tetap menjadi bebannya.

Terkait aktivitas sosial kemasyarakatan, Suminah hanya mengikuti kegiatan khusus untuk perempuan seperti arisan dan pengajian khusus ibu-ibu saat hari raya besar. Ada pengajian rutin ibu-ibu di Desa Kenanga tetapi Suminah tidak mengikutinya. Hal ini memperlihatkan beban ganda yang dialami perempuan karena kerja domestik dan kerja produktifnya ikut menghalangi perempuan terlibat dalam aktivitas sosial yang rutin.

Dalam hal dana, modal awal usaha kerupuk kulit ikan Suminah berasal dari uang hasil tabungan ia bekerja di luar negeri, sedangkan dalam hal keuangan keluarga, Suminah hanya mengelola sebarangpun uang yang diserahkan suami kepadanya. *'Cukup gak cukup, suami gak mau tau, pokoknya dikasihnya segitu, ya bisa-bisanya kita isteri ngelolanya'*, demikian kata Suminah sewaktu menjelaskan kepada kami bagaimana pengelolaan keuangan keluarga. Secara tidak langsung, hal ini memperlihatkan bagaimana perempuan dituntut agar dapat mengatur pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga, sementara suami tidak mau tau apakah uang yang diberikan cukup atau tidak cukup. Beban keluarga kembali diletakkan di bahu perempuan.

## **Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perempuan di Desa Kenanga dalam Konteks Migrasi**

Kebijakan nasional mengenai pengiriman pekerja migran ke luar negeri merupakan keputusan politik pemerintah di tingkat nasional, sejak era Orde Baru yang berdampak pada kehidupan masyarakat di desa, termasuk Desa Kenanga. Kebijakan pembangunan pemerintahan Soeharto sangat bergantung pada modal asing, sehingga sumber daya alam dikuasai pemodal asing, dan penduduk miskin dari desa dengan ketrampilan rendah terpaksa meninggalkan desanya untuk menjadi pekerja migran di luar negeri. Angkatan kerja yang berpendidikan dan berketerampilan rendah ini, umumnya perempuan yang mengisi posisi sebagai pekerja rumah tangga migran (Ibad et al. 2015). Desa Kenanga, juga terimbas dari kebijakan ini, dimana secara turun-temurun mayoritas penduduk khususnya perempuan di Desa Kenanga menjadi pekerja migran.

Melalui analisis Longwee, didapati enam aspek yang berpengaruh di Desa Kenanga, yakni (1) aspek politik; (2) ekonomi; (3) Pendidikan; (4) hukum; (5) lingkungan; (6) sosial. Pertama, aspek Politik, dalam wawancara yang kami lakukan, Pak Darpani selaku kepala desa (pada tahun 2017) mengungkapkan bahwa dirinya mendukung migrasi yang aman. Artinya, pelayanan dilakukan satu atap dan sistem pendataan terintegrasi melalui desa. Pernyataan kepala desa tersebut memperlihatkan dua sisi yang berbeda. Pada satu sisi, kegiatan yang dilakukan oleh Wina mencoba untuk membuat pekerja migran tidak lagi bekerja di luar negeri dan memilih untuk memanfaatkan potensi lokal agar dapat bekerja di negeri sendiri. Pada sisi yang lain, kepala desa mendukung warganya untuk menjadi pekerja migran sejalan dengan kebijakan nasional.

Kedua, dalam aspek ekonomi, perempuan maupun laki-laki mendapatkan dampak dan kesempatan yang sama. Akan tetapi perempuan masih memiliki kendala terhadap akses dan partisipasinya di dalam ketenagakerjaan. Akses lapangan pekerjaan masih terbatas dan pekerjaan sebagai pekerja migran masih menjadi pilihan yang menjanjikan bagi perempuan di desa Kenanga. Lebih lanjut, perlu dikritisi pula tentang Program Desmigratif yang merupakan bentuk program yang cenderung *'hit and run'* tidak mendukung keberlanjutan program. Pelaku usaha purna pekerja migran diberikan alat/perlengkapan, satu dua kali pelatihan dan pembangunan fisik 'rumah edukasi', tanpa kegiatan berkelanjutan. Pemberian alat untuk menunjang usaha ekonomi purna pekerja migran, tidak serta-merta menjamin keberlanjutan usaha, karena

perempuan purna pekerja migran masih tetap bergumul dengan masalah pemasaran dan kompetisi produk.

Ketiga, pada aspek pendidikan, berdasarkan data Indramayu tahun 2017 di Kecamatan Sindang jumlah sekolah terbanyak ada pada bangku sekolah dasar (SD), yakni sebanyak 891 sekolah. Adapun pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA) jumlahnya tidak sebanyak SD. Jumlah SMP yaitu sebanyak 203 sekolah dengan jumlah murid sebanyak 5.299 orang dan jumlah guru sebesar 326 orang. Jumlah ini memperlihatkan bahwa terhadap ketimpangan antara jumlah murid dan guru yang berimplikasi terhadap kualitas murid itu sendiri. Adapun untuk tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jumlahnya lebih banyak, yakni sebanyak 134 sekolah. Hal ini menandakan bahwa di daerah tersebut lebih mendorong warganya untuk menjadi tenaga kerja siap pakai. Misalnya saja pada kasus narasumber Rita, anaknya adalah lulusan SMK dan dipersiapkan untuk bekerja di Korea. Artinya, menempuh pendidikan hingga jenjang SMK dianggap menjanjikan untuk berkarir sebagai pekerja migran.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada ketiga narasumber, tingkat pendidikan perempuan masih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Anak perempuan didorong untuk menikah di usia muda dan mereka tidak melanjutkan lagi pendidikannya. Misalnya pada pengalaman Rita yang dipaksa menikah pada usia yang sangat muda. Setelah lulus sekolah menengah pertama (SMP), Rita memutuskan untuk menjadi pekerja migran di Arab Saudi agar dirinya tidak dinikahkan. Dalam hal ini, Rita tidak mendapatkan kesempatan untuk bersekolah lebih tinggi lagi. Melalui kasus Rita, posisi perempuan masih sangat lemah dibandingkan dengan laki-laki. Anak perempuan ter subordinasi dan dilabel untuk bekerja di ranah domestik, sehingga tidak perlu untuk mengenyam pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Implikasinya, dengan pendidikan rendah tersebut hanya menempatkan perempuan pada sektor kerja level bawah.

Keempat, dari segi hukum, implementasi hukum belum berdampak baik terhadap perempuan dan laki-laki, khususnya jika dikaitkan dengan penanganan kasus pekerja migran di Desa Kenanga. Baik perempuan maupun laki-laki calon pekerja migran sama-sama mengalami tindak pidana perdagangan orang karena banyak dari mereka berangkat dengan pemalsuan dokumen dan di bawah umur. Padahal menurut UU No. 21 tahun 2007 mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), seseorang yang dipindahkan untuk bekerja di bawah

umur, masuk dalam kategori TPPO dan pelaku TPPO bisa dikenakan tuntutan pidana serta perdata. Jika hal ini diimplementasikan dengan baik, para calo dan agen perekrut yang mengurus keberangkatan calon pekerja migran bisa dikenakan sanksi hukum. Sayangnya, baik perempuan maupun laki-laki di Desa Kenanga belum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai hal ini, sehingga tidak melaporkan pelanggaran hukum terhadap mereka. Wina misalnya berangkat ke luar negeri dalam usia remaja, belum 18 tahun karena ketidaktahuannya akan perangkat hukum TPPO.

Selain terkait TPPO, implementasi UU No. 39 tahun 2004 mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri juga belum memiliki dampak yang baik bagi calon pekerja migran dari Desa Kenanga. Sebagai contoh, Darini dipekerjakan tidak sesuai kontrak awal pada waktu ia bekerja di Korea, padahal dalam UU. No.39/2004, mensyaratkan pekerja migran harus bekerja sesuai kontrak tertulis yang berlaku. UU ini dinilai tidak berpihak pada pekerja migran dan menguntungkan pihak swasta, serta tidak berperspektif gender (Irianto 2011).

Kelima, pada aspek lingkungan di desa Kenanga, mangga adalah salah satu sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk setempat. Dalam kegiatan yang dilakukan oleh Wina, dirinya berusaha untuk memanfaatkan potensi lokal untuk menghasilkan produk yang bernilai jual. Beberapa produk yang ia hasilkan dari mangga adalah sirup, es, manisan mangga, dan sebagainya. Pada narasumber Rita misalnya, ia memafaatkan mangga sebagai produk andalannya, yaitu dodol mangga. Menurut Rita, mangga adalah ciri khas dari Indramayu dan dapat digunakan sebagai daya jual. Oleh sebab itu, hingga saat ini ia menjual dodol mangga di toko oleh-oleh sebagai makanan khas Indramayu.

Berkaitan dengan aspek lingkungan, dampak, kesempatan, maupun kendala dialami oleh perempuan maupun laki-laki. Kendala yang dimaksud adalah tidak meratanya distribusi sumber daya alam disebabkan oleh sistem sewa pohon mangga. Umumnya, para warga memiliki pohon mangga di halaman rumahnya dan mereka akan menyewakan pohonnya (pemilik pohon tidak boleh mengambil buah mangga dan setelah semuanya matang akan diberikan kepada si penyewa).

Keenam, pada aspek sosial terlihat bahwa para pekerja migran di Desa Kenanga telah mampu membangun rumah dilengkapi dengan ubin. Membangun rumah sendiri dari hasil bekerja di luar negeri merupakan kebanggaan tersendiri bagi mereka. Rumah adalah simbol keberhasilan sekaligus prestise bagi warga sekitar. Hal

ini memperlihatkan aktualisasi diri bahwa mereka telah berhasil bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran. Kondisi ini tentunya berimplikasi pada tingginya angka perempuan yang bekerja sebagai pekerja migran. Dalam aspek ini, baik perempuan maupun laki-laki diberikan kesempatan yang sama untuk bekerja. Adapun kendala pada perempuan maupun laki-laki yang ingin bermigrasi adalah terwujudnya migrasi yang aman bagi mereka.

Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh perempuan purna pekerja migran telah menyentuh dimensi kesejahteraan dan akses. Pada aspek kesejahteraan, perempuan purna pekerja migran telah terpenuhi kebutuhan praktisnya dan mendapatkan akses terhadap distribusi sumber daya alam. Dalam hal akses, pelatihan untuk peningkatan kualitas produk maupun pendidikan telah didapatkan oleh para perempuan purna pekerja

migran. Namun demikian, mereka belum sampai pada dimensi kontrol (sebagai puncak pemberdayaan), sebab dimensi kesadaran kritis dan partisipasinya belum terpenuhi.

### Inisiatif Lokal dalam Indikator PUG dan Teori Pemberdayaan

Dalam menganalisis kegiatan penguatan usaha ekonomi produktif perempuan purna pekerja migran tulisan ini menggunakan analisis pengarusutamaan gender dan teori feminis tentang pemberdayaan. Analisis Indikator Pengarusutamaan Gender (IPG) digunakan untuk melihat secara detail akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang didapatkan oleh perempuan pekerja migran melalui kegiatan penguatan usaha ekonomi produktif yang diinisiasi oleh Wina di Desa Kenanga.

**Tabel 1. Indikator Pengarusutamaan Gender Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif**

Analisis Gender	Kegiatan Penguatan Usaha Ekonomi Produktif Perempuan Purna Pekerja Migran
<b>Akses</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Akses kegiatan ini diberikan kepada purna pekerja migran yang telah memiliki usaha baik laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi perempuan lebih banyak terlibat dalam kegiatan ini karena mayoritas purna pekerja migran di Desa Kenanga adalah perempuan.</li> <li>● Perempuan purna pekerja migran yang terlibat dalam kegiatan ini, mendapatkan akses terhadap peralatan kerja, sertifikasi usaha, pendidikan dan pelatihan, pemasaran, dan peningkatan kualitas produk.</li> </ul>
<b>Partisipasi</b>	Perempuan purna pekerja migran dalam kegiatan ini berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan. Akan tetapi mereka belum dilibatkan dalam proses pengajuan untuk mendapatkan bantuan secara partisipatif, serta penentuan kebutuhan pendidikan dan pelatihan.
<b>Kontrol</b>	Tidak ada kontrol langsung inisiator kegiatan terhadap perempuan purna pekerja migran penerima manfaat, sehingga tidak ada pengukuran kegiatan maupun bantuan yang disalurkan berdampak atau tidak terhadap peningkatan ekonomi. Pengontrolan usaha dilakukan oleh penerima manfaat baik terhadap keuntungan maupun pengelolaan keuangan.
<b>Manfaat</b>	Kegiatan ini secara langsung dirasakan manfaatnya oleh purna pekerja migran yang telah memiliki usaha ekonomi produktif, sedangkan purna pekerja migran yang belum memiliki usaha produktif belum merasakan manfaat dari kegiatan ini.

Melalui IPG, didapati bahwa perempuan purna pekerja migran telah mendapatkan akses, namun dalam hal partisipasi maupun kontrol mereka belum sepenuhnya terlibat. Adapun pada dimensi manfaat, para perempuan purna pekerja migran telah mendapatkan manfaat secara langsung dari usaha ekonomi yang mereka geluti.

Analisis lebih jauh mengenai pemberdayaan perempuan purna pekerja migran akan digali dengan teori pemberdayaan oleh Naela Kabeer. Alat analisis tersebut digunakan untuk melihat dampak penguatan

ekonomi produktif terhadap keberdayaan perempuan purna pekerja migran di Desa Kenanga. Menurut Naela Kabeer, pemberdayaan berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk memilih (*ability to choice*) dan proses perubahan dari kondisi tidak berdaya menjadi kondisi mampu/*ability*. Menurut Kabeer, ada hubungan logis, keterkaitan dan kesamaan antara kemiskinan dan ketidakberdayaan yaitu kedua kondisi tersebut sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar (Kabeer 2001). Namun Kabeer menggarisbawahi bahwa tidak serta merta seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya

telah berdaya, menurutnya keberdayaan itu berkaitan dengan restriksi sosial dan kemampuan seseorang untuk membuat pilihan strategis seperti pilihan penghidupan, tempat tinggal, apakah akan menikah, siapa yang harus dinikahkan, kapan punya anak, berapa anak, kebebasan bergerak dan pilihan teman, yang sangat penting bagi seseorang untuk menjalani kehidupan yang mereka inginkan (Kabeer 2001).

Lebih lanjut Kabeer menawarkan 3 dimensi pemberdayaan yang menurutnya saling terkait satu sama lain, yaitu (1) sumber daya (*resources*); (2) agensi (*agency*); dan (3) pencapaian (*achievement*). Pertama, sumber daya terdiri dari sumber daya material, manusia dan sosial. Sumber daya material meliputi tanah, rumah, peralatan dan modal kerja. Kemudian sumber daya manusia meliputi pengetahuan, keterampilan, kreativitas, imajinasi dll. Sedangkan sumber daya sosial dapat berupa kewajiban, harapan, relasi, jejaring. Kedua, agensi adalah kemampuan seseorang baik secara individu maupun kolektif untuk menentukan pilihan, bertindak dan menentukan tujuan hidup mereka sendiri secara otonom.

Kabeer menjelaskan bahwa sumber daya dan agensi keduanya dianggap sebagai sebuah potensi seseorang untuk hidup dan melakukan sesuatu (*being and doing*). Jika seseorang gagal dalam menjadi diri dan melakukan sesuatu (*being and doing*) maka akan memengaruhi dimensi pemberdayaan ketiga yaitu pencapaian (*achievement*). Kegagalan pencapaian dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor misalnya kemalasan, ketidakmampuan atau alasan individu lainnya. Namun bila kegagalan pencapaian disebabkan oleh distribusi sumber daya yang tidak setara, maka menurut Kabeer hal tersebut adalah sebuah manifestasi ketidakberdayaan.

Berdasarkan teori pemberdayaan yang ditawarkan Kabeer pada dimensi pemberdayaan pertama yaitu sumber daya, maka dapat dikatakan bahwa perempuan purna pekerja migran penerima manfaat kegiatan telah memiliki akses terhadap sumber daya material yaitu peralatan kerja. Namun modal kerja berupa uang memang belum memadai guna mengembangkan usaha mereka, begitu juga tempat usaha belum tersedia. Contohnya Suminah yang masih menjadikan rumah orang tua sebagai tempat usaha atau bisa dikatakan tidak memiliki tempat usaha secara khusus. Hal ini juga berkaitan dengan tidak adanya akses dan kontrol terhadap tanah milik suami. Sumber daya lainnya, yaitu sumber daya manusia yang dimiliki ialah pengetahuan dan keterampilan tentang pengembangan usaha, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kegiatan

penguatan ekonomi usaha produktif berkontribusi terhadap peningkatan pengetahuan dan kemampuan penerima manfaat. Sedangkan sumber daya sosial berupa jejaring untuk pemasaran dan perluasan usaha belum dimiliki.

Demikian halnya pada kasus Rita. Berdasarkan hasil wawancara, ia masih memiliki kendala terhadap pemasaran maupun modal. Ia mengakui bahwa modal dan promosi terhadap produk dodol mangganya masih terbatas, sehingga produknya belum dapat dikembangkan secara maksimal. Adapun untuk permodalan ia peroleh dari hasil uang yang ia tabung sedikit demi sedikit dari suaminya. Biasanya suami Rita memberikan uang bulanan untuk kebutuhan keluarga dan berbekal penyesuaian uang itulah ia mendapatkan modal usaha. Rita juga masih memikirkan strategi agar produknya dapat dijual secara luas, karena hingga saat ini penjualannya masih berputar di sekitar Indramayu seperti warung makan, toko oleh-oleh, maupun koperasi. Artinya kegiatan penguatan ekonomi ini belum memenuhi sumber daya sosial dari para penerima manfaat.

Dimensi pemberdayaan kedua yang dikemukakan Kabeer yaitu agensi. Perempuan purna pekerja migran penerima manfaat pada faktanya belum memiliki kemampuan untuk membuat pilihan strategis dalam hidupnya secara otonom. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor misalnya relasi perempuan dengan keluarganya (suami, anak, orang tua) yang membuat perempuan memiliki keterbatasan untuk menentukan pilihan hidup. Berefleksi dari kisah Darini, ia awalnya dilarang suaminya untuk mengikuti kegiatan organisasi, meskipun pada akhirnya ia diperbolehkan mengikuti kegiatan namun tetap tidak bisa maksimal karena dibebani dengan kerja produksi dan reproduksi yang harus ia tanggung (beban ganda). Hal tersebut juga dialami oleh Suminah, ia tidak bisa mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan (pengajian rutin ibu-ibu) karena kerja reproduksi dan produksi menyita waktunya. Pada kasus Rita, keputusannya untuk membatasi kegiatan kemasyarakatan disebabkan oleh kondisi aktivitas produksi maupun reproduksi yang ia kerjakan diri. Kegiatan seperti KAMI, pengajian, maupun aktivitas lainnya tidak ia lakukan secara rutin dan hanya sesekali saja, sebab Rita lebih mengutamakan pekerjaannya di dalam rumah sebagai istri, ibu, sekaligus pelaku usaha ekonomi produktif. Meskipun mereka memiliki keinginan untuk mengembangkan diri namun hal itu masih belum bisa diwujudkan.

Dimensi pemberdayaan ketiga yang dikemukakan oleh Kabeer ialah pencapaian. Seperti yang telah

diuraikan di atas bahwa pencapaian dipengaruhi oleh sumber daya dan agensi seseorang. Dalam konteks perempuan penerima manfaat (Darini, Rita, dan Suminah) dapat dilihat bahwa sumber daya dan agensi belum sepenuhnya dimiliki oleh mereka, artinya mereka sepenuhnya belum memiliki apa yang disebut Kabeer sebagai potensi "*being and doing*". Hal tersebut dapat dilihat dari distribusi kemampuan yang tidak setara, contohnya Darini meskipun telah memiliki akses dan kontrol terhadap aset usaha namun ia belum mampu membuat pilihan strategis terkait keuntungan usaha maupun kehendak untuk berorganisasi, keputusan-keputusan yang dibuat masih harus mempertimbangkan soal peran sebagai istri di dalam rumah tangga. Artinya kegiatan penguatan usaha tersebut belum mampu menyelesaikan persoalan relasi gender seperti pembagian kerja dalam rumah tangga, akses terhadap sumber daya material dan sosial.

## Kesimpulan

Tulisan ini menemukan bahwa inisiatif lokal ekonomi produktif membawa dampak positif terhadap keberlanjutan ekonomi purna pekerja migran di Desa Kenanga. Terbukti dengan meningkatnya pendapatan pelaku usaha ekonomi produktif yang didampingi oleh Wina melalui inisiasi program ekonomi produktif. Program ini juga menjadi salah satu jalan keluar perempuan purna pekerja migran untuk tidak kembali dalam lingkaran migrasi tidak aman—seperti penipuan, kekerasan ekonomi, fisik dan psikis. Program ekonomi produktif ini merupakan manifestasi dari berbagai kekecewaan dari kerja migrasi yang tidak mampu meningkatkan derajat hidup dan keberlanjutan ekonomi di kampung halaman.

Dalam analisis gender Harvard, ditemukan bahwa beban atas kerja produksi dan non-produksi perempuan purna pekerja migran ditanggung secara berbeda pada masing-masing rumah tangga. Pada titik inilah program ekonomi produktif di Desa Kenanga perlu melakukan intervensi lebih jauh terhadap nilai-nilai adil gender di dalam keluarga—selain pendampingan secara keberlanjutan ekonomi. Dalam analisis Longwee ditemukan bahwa berbagai kegiatan yang dilakukan oleh perempuan purna pekerja migran telah menyentuh dimensi kesejahteraan dan akses. Pada aspek kesejahteraan, perempuan purna pekerja migran telah terpenuhi kebutuhan praktisnya dan mendapatkan akses terhadap distribusi sumber daya alam. Dalam hal akses, pelatihan untuk peningkatan kualitas produk maupun pendidikan telah didapatkan oleh para perempuan purna pekerja migran. Namun demikian, mereka belum sampai

pada dimensi kontrol (sebagai puncak pemberdayaan), sebab dimensi kesadaran kritis dan partisipasinya belum terpenuhi.

Kemudian, dalam inisiatif penguatan gender, kegiatan ini secara langsung dirasakan manfaatnya oleh purna pekerja migran yang telah memiliki usaha ekonomi produktif dan menjadi ruang percontohan dan harapan bagi calon pekerja migran, pekerja migran, dan purna pekerja migran lainnya sehingga mendorong mereka untuk meningkatkan ekonomi (tanpa harus bermigrasi) dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Sebagai sebuah inisiatif lokal individu (bukan kolektif) penting untuk mendorong partisipasi aktif penerima manfaat dalam hal akses dan kontrol terhadap program.

Adapun melalui dimensi pemberdayaan dikemukakan Kabeer yaitu sumber daya (*resources*); (2) agensi (*agency*); dan (3) pencapaian (*achievement*). Perempuan purna pekerja migran penerima manfaat melalui program ekonomi produktif ini telah memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya, namun di sisi lain belum memiliki kemampuan untuk membuat pilihan strategis dalam hidupnya secara otonom. Dari segi agensi (khususnya dalam aspek pengambilan keputusan), masih berada pada level pekerjaan rumah. Artinya pengetahuan kesadaran kritis terhadap posisi atau peran perempuan dalam rumah tangga perlu untuk didorong.

Inisiatif lokal penguatan ekonomi sangat mungkin dilakukan untuk memutus mata rantai kekerasan migrasi yang tidak aman. Hal ini mengingat bahwa menjadi pekerja migran tidak bisa dilakukan selamanya. Ketahanan ekonomi di daerah asal menjadi penting untuk dibangun sebagai salah satu jalan keluar untuk mengentaskan kemiskinan. Namun demikian, penguatan ekonomi tanpa ketidakadilan gender dan pemberdayaan akan tetap menempatkan perempuan pada beban kerja berlapis dalam akses dan kontrol terhadap sumber daya di tingkat rumah tangga. Hal ini dapat berpotensi menyebabkan bentuk kekerasan baru bagi purna pekerja migran. Kerangka analisis gender memiliki peran penting dalam mengidentifikasi kebutuhan dan celah program pemberdayaan.

## Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Indramayu 2017, *Kabupaten Indramayu dalam Angka 2017*, BPS Kabupaten Indramayu, Indramayu.
- Bank Dunia 2017, *Pekerja Global Indonesia: Antara Peluang dan Risiko*, World Bank Group, Australian Government, Jakarta.
- BP2MI 2020, *Data Penempatan dan Perlindungan TKI periode tahun 2019*, diakses pada 29 Juli 2020, <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-perlindungan-tki-pe-riode-tahun-2019>.

- BNP2TKI 2019, *Data Penempatan dan Perlindungan TKI MARET 2019*, diakses pada 2 Agustus 2020, [http://portal.bnp2tki.go.id/uploads/data/data\\_18-04-2019\\_010851\\_Laporan\\_Pengolahan\\_Data\\_BNP2TKI\\_Bulan\\_Maret\\_.pdf](http://portal.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_18-04-2019_010851_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_Bulan_Maret_.pdf)
- FAO 2014, *Conducting a Gender Analysis For Programme Design*, diakses pada 29 Juli 2020, [http://www.fao.org/elearning/Course/FG/en/pdf/1348\\_text\\_only\\_1348.pdf](http://www.fao.org/elearning/Course/FG/en/pdf/1348_text_only_1348.pdf)
- Gov. HK 2020, *Statistics on the number of Foreign Domestic Helpers in Hong Kong*, diakses pada 1 Agustus 2020, [data.gov.hk/en-data/dataset/hk-imm-d-set4-statistic-fdh](http://data.gov.hk/en-data/dataset/hk-imm-d-set4-statistic-fdh)
- Ibad, Irsyahid et al. 2015, *Modul Pendidikan Dasar dan Menengah Buruh Migran*, Tifa Foundation dan DPN SBMI, Jakarta.
- Irawaty, D 2017, "Pekerja Rumah Tangga di antara Paradoks Politik Gender dan Politik Developmentalisme: Studi Kasus dari Indonesia Era Orde Baru", *Jurnal Perempuan*, Vol. 22(3), h. 76-100.
- Irianto, S 2011, *Akses Keadilan dan Migrasi Global*, Yayasan Obor, Jakarta.
- IOM 2020, "Facilitation of Safe, Orderly and Regular Migration", diakses pada 1 Agustus 2020, [https://www.iom.int/sites/default/files/our\\_work/ODG/GCM/IOM-Thematic-Paper-Facilitation-of-Safe-Orderly-and-Regular-Migration.pdf](https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ODG/GCM/IOM-Thematic-Paper-Facilitation-of-Safe-Orderly-and-Regular-Migration.pdf)
- Kabeer, Naila 2001, "Reflection on The Measurement of Women's Empowerment" dalam Sisask, Anne (Ed.), *Discussing Women's Empowerment: Theory and Practice*, Sida Studies, h. 17-87.
- Leder, S 2016, *Linking Women's Empowerment And Resilience*, diakses pada 28 Juli 2020, [https://www.researchgate.net/figure/The-Womens-Empowerment-Framework-by-Longwe-1995\\_fig13\\_289757039](https://www.researchgate.net/figure/The-Womens-Empowerment-Framework-by-Longwe-1995_fig13_289757039)
- March, Candida et al. 1999, *A Guide to Gender- Analysis Frameworks*, Oxfam GB, London.
- Moser, O.N Caroline 1993, "Gender Planning and Development, Theory, Practice, Training", Routledge, USA & Canada.
- Saptari, R & Holzner, B 2016, *Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan*, Kalyanamitra, Jakarta Timur.
- Sida 2015, *Gender Analysis – Principles & Elements*, diakses pada 29 Juli 2020, <https://www.sida.se/contentassets/a3f08692e731475db106fdf84f2fb9bd/gender-tool-analysis.pdf>
- Molland, S 2015, "Safe Migration as an emerging anti-trafficking agenda?", *Open Democracy*, diakses pada 1 Agustus 2020, [www.opendemocracy.net/en/beyond-trafficking-and-slavery/safe-migration-as-emerging-antitrafficking-agenda/](https://www.opendemocracy.net/en/beyond-trafficking-and-slavery/safe-migration-as-emerging-antitrafficking-agenda/)
- Wahyudi, Ridwan 2016, "Moratorium Penempatan PRT Migran dan Kebijakan Zero PRT 2017", diakses pada 1 Agustus 2020, <https://buruhmigran.or.id/2016/08/22/moratorium-penempatan-prt-migran-dan-kebijakan-zero-prt-2017/>
- Wangka, YV 2020, "Dialektika Negara, Swasta, dan Pekerja Rumah Tangga Migran dalam Kebijakan Ketenagakerjaan Indonesia", dalam Andi Misbahul Pratiwi (ed.), *Ekonomi Informal di Indonesia: Tinjauan Kritis Kebijakan Ketenagakerjaan*, h. 135-160.
- Wang, CH et al. 2018, "The Foreign Domestic Workers in Singapore, Hong Kong, and Taiwan: Should Minimum Wage Apply to Foreign Domestic Workers?", *The Chinese Economy*, Vol. 51, h. 154-174.
- "Mewujudkan Mimpi Keluarga Pekerja Migran dengan Desmigratif" 2019, *Kata Data*, 29 Juli, diakses 20 Juli 2020, <https://katadata.co.id/arsip/berita/5e9a50d6d0469/mewujudkan-mimpi-keluarga-pekerja-migran-dengan-desmigratif>
- "Desmigratif, perlindungan pekerja migran mulai dari desa" 2018, *Media Indonesia*, 10 Desember, diakses pada 29 Juli 2020, <https://mediaindonesia.com/read/detail/203147-desmigratif-perlindungan-pekerja-migran-mulai-dari-desa>
- "Pemerintah Diminta Evaluasi Moratorium Pengiriman TKI ke Timur Tengah" 2017, *KOMPAS*, 26 September, diakses pada 19 Agustus 2020 <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/26/09152681/pemerintah-diminta-evaluasi-moratorium-pengiriman-tki-ke-timur-tengah>.

## **Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari**

1. Prof. Sylvia Tiwon (University of California)
2. Prof. Dr. Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
3. Dr. Andi Achdian (Universitas Nasional)
4. Yacinta Kurniasih, M.A.(Monash University)
5. Dr. Nur Iman Subono (Universitas Indonesia)
6. Elisabet Repelita Kuswijayanti, M.Si. (Indonesia)



## ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

**Jurnal Perempuan** (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada ([redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com)).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan subbagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa subbab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam subbab-subbab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan/atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:  
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.  
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, [http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational\\_for\\_PSWG\\_en\\_Indonesia.pdf](http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf)  
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.  
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.  
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, *KOMPAS*, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi [redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com) untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN  
**YJP**  
JURNAL  
PEREMPUAN

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A  
Jati Padang, Pasar Minggu,  
Jakarta Selatan 12540  
INDONESIA  
Phone/Fax: +62 21 22701689

**MAMPU**

Kemitraan Australia - Indonesia  
untuk Kesetaraan Gender  
dan Pemberdayaan Perempuan



**MIGRANT CARE**  
Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat

